

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PEDOMAN TEKNIS

KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU TANAMAN (OPT), PENYAKIT HEWAN, KARANTINA DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN (TP)

(KODE 1564)

**(DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROPINSI)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan tanaman hortikultura merupakan bagian integral dari sistem produksi hortikultura. Peran perlindungan tanaman dalam mendukung keberhasilan program pengembangan hortikultura sangat besar, terutama dalam mempertahankan produktivitas melalui upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan OPT dan meningkatkan kualitas hasil yang memiliki daya saing tinggi dan aman dikonsumsi masyarakat, serta menciptakan suatu sistem produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, maupun mendukung pemenuhan sebagian persyaratan teknis dalam perdagangan hortikultura.

Dalam mendukung sistem produksi, strategi perlindungan hortikultura dilakukan melalui berbagai upaya kegiatan, antara lain melalui peningkatan subsistem pengamatan/peramalan, subsistem pengendalian, subsistem penerapan teknologi pengendalian, subsistem penyediaan sarana perlindungan dan subsistem pemberdayaan pelaku perlindungan tanaman. Subsistem pengamatan/peramalan mengembangkan sistem penyediaan data, informasi dan pelaporan serangan OPT, subsistem pengendalian mengembangkan gerakan pengendalian yang didasarkan pada hasil pengamatan, subsistem penerapan teknologi pengendalian menggali dan mengembangkan penerapan teknologi pengendalian yang efektif dan efisien sesuai sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), subsistem penyediaan sarana perlindungan tanaman

mengembangkan penggunaan sarana perlindungan tanaman yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan subsistem pemberdayaan pelaku perlindungan tanaman mengembangkan kemampuan dan keterampilan pelaku maupun kelembagaan perlindungan tanaman dalam menanggulangi permasalahan OPT, bencana alam maupun berbagai persoalan perlindungan tanaman hortikultura.

Di bidang peningkatan mutu khususnya untuk ekspor impor, kebijakan non tarif telah diberlakukan dalam perdagangan dunia, yaitu *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS). Standar-standar yang terkait penetapan kebijakan TBT, seperti SNI (tingkat nasional), standar Uni Eropa yaitu UREP-GAP (*Good Agricultural Practices*), dan ISO, CAC (*Codex Alimentarius Commission*), saat ini merupakan faktor penguat daya saing suatu produk. Demikian pula dengan standar-standar yang terkait SPS, seperti standar-standar yang ditetapkan IPPC dan FAO, yaitu *International Standard for Phytosanitary Measures* (ISPM), menjadi faktor teknis lain yang memperkuat daya saing produk. Kegiatan perlindungan tanaman haruslah berperan dalam wilayah ini.

Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura diarahkan untuk upaya pengamanan produksi dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim, menjamin mutu produk hortikultura agar aman konsumsi, serta terpenuhinya beberapa persyaratan SPS-WTO untuk akses pasar ekspor dalam rangka peningkatan daya saing produk.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan kegiatan adalah :

1. Menekan kerugian hasil karena gangguan OPT, dampak perubahan iklim (banjir, kekeringan, OPT baru, dan perubahan status OPT); meningkatkan produksi hortikultura untuk konsumsi dalam negeri, baik jumlah maupun mutu, serta mengurangi residu pestisida dalam proses produksi, melalui gerakan pengendalian OPT.
2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan OPT secara ramah lingkungan.
3. Meningkatkan koordinasi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam gerakan pengendalian OPT hortikultura;
4. Meningkatkan kemampuan SDM dan kelembagaan perlindungan hortikultura dalam gerakan pengendalian OPT hortikultura;

Sasaran kegiatan adalah :

1. Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura, maksimum 5 % terhadap luas panen
2. Jumlah peraturan, rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur perlindungan tanaman
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan gerakan pengendalian, pelatihan, penyebarluasan informasi terkait perlindungan tanaman hortikultura

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada 15 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu NAD, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan timur, Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Lokasi kegiatan ini difokuskan pada sentra-sentra produksi hortikultura, lokasi pengembangan kawasan hortikultura, daerah daerah/lokasi pelaksanaan program program pengembangan agribisnis hortikultura di 15 propinsi sebagaimana tersebut diatas.

2. Komponen kegiatan

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah kegiatan dalam rangka menunjang sistem perlindungan tanaman mencakup berbagai kegiatan utama (payung kegiatan), yaitu : (1) pertemuan sosialisasi, koordinasi dan workshop gerakan pengendalian OPT, (2) kegiatan pendukung peramalan OPT dan fenomena iklim, yang dikoordinasikan dengan UPT BTPH, (3) pengadaan sarana pengendalian OPT.

3. Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di 15 provinsi sebagaimana tersebut diatas bekerjasama dengan UPT BTPH dimasing-masing propinsi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh dana APBN yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di 15 provinsi sebagaimana tersebut diatas.

5. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan petugas/aparatur perlindungan tanaman dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di 15 provinsi dan berkoordinasi dengan UPTD BTPH, instansi terkait, dan petani di wilayah pengembangan agribisnis hortikultura.

Metode pelaksanaan dalam bentuk pertemuan koordinasi, pembinaan/bimbingan teknis, sosialisasi/workshop, penerapan teknologi pengendalian OPT dengan agens hayati dan biopestisida, maupun saran pengendalian lainnya.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Sumberdaya manusia
2. Teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun pihak terkait lainnya
3. Pendanaan bersumber dari APBN

B. Keluaran (Output)

Berkembangnya sistem gerakan pengendalian OPT dalam mendukung keberlanjutan penyediaan produk hortikultura yang cukup, bermutu dan aman konsumsi serta pemenuhan sebagai persyaratan teknis perdagangan hortikultura, dengan indikator sebagai berikut :

1. Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura, maksimum 5 % terhadap luas panen
2. Jumlah peraturan, rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur perlindungan tanaman
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan gerakan pengendalian, pelatihan, penyebarluasan informasi terkait perlindungan tanaman.

Ukuran out put adalah :

Kuantitas :

1. Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura, maksimum 5 % terhadap luas panen
2. Jumlah peraturan, rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur perlindungan tanaman
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan gerakan pengendalian, pelatihan, penyebarluasan informasi terkait perlindungan tanaman

Kualitas :

1. Efektifitas dan efisiensi pengendalian OPT
2. Tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip gerakan pengendalian OPT
3. Kesigapan menanggapi kasus OPT/Iklim

C. Hasil (Outcome)

Gerakan pengendalian OPT dalam mendukung peningkatan produksi, keamanan pangan, mutu dan terpenuhi sistem perlindungan tanaman.

D. Manfaat (Benefit)

Pengendalian OPT dilaksanakan secara efektif, efisien dan aman lingkungan dalam mendukung peningkatan produksi, keamanan pangan, mutu dan terpenuhinya persyaratan perdagangan komoditi hortikultura, baik domestic maupun internasional.

E. Dampak (Impact)

Meningkatnya kemampuan dan kesadaran petugas/petani dalam penerapan prinsip-prinsip gerakan PHT dalam rangka peningkatan produksi, keamanan pangan, mutu terpenuhinya persyaratan perdagangan komoditi hortikultura, baik domestic maupun internasional.

PEDOMAN TEKNIS
KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME
PENGGANGGU TANAMAN (OPT), PENYAKIT
HEWAN, KARANTINA DAN PENINGKATAN
KEAMANAN PANGAN (TP)
(UPT BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan tanaman hortikultura merupakan bagian integral dari sistem produksi hortikultura. Peran perlindungan tanaman dalam mendukung keberhasilan program pengembangan hortikultura sangat besar, terutama dalam mempertahankan produktivitas melalui upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan OPT dan meningkatkan kualitas hasil yang memiliki daya saing tinggi dan aman dikonsumsi masyarakat, serta menciptakan suatu sistem produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, maupun mendukung pemenuhan sebagian persyaratan teknis dalam perdagangan hortikultura.

Dalam mendukung sistem produksi, strategi perlindungan hortikultura dilakukan melalui berbagai upaya kegiatan, antara lain melalui peningkatan subsistem pengamatan/peramalan, subsistem pengendalian, subsistem penerapan teknologi pengendalian, subsistem penyediaan sarana perlindungan dan subsistem pemberdayaan pelaku perlindungan tanaman. Subsistem pengamatan/peramalan mengembangkan sistem penyediaan data, informasi dan pelaporan serangan OPT, subsistem pengendalian mengembangkan gerakan pengendalian yang didasarkan pada hasil pengamatan, subsistem penerapan teknologi pengendalian menggali dan

mengembangkan penerapan teknologi pengendalian yang efektif dan efisien sesuai sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), subsistem penyediaan sarana perlindungan tanaman mengembangkan penggunaan sarana perlindungan tanaman yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan subsistem pemberdayaan pelaku perlindungan tanaman mengembangkan kemampuan dan keterampilan pelaku maupun kelembagaan perlindungan tanaman dalam menanggulangi permasalahan OPT, bencana alam maupun berbagai persoalan perlindungan tanaman hortikultura.

Di bidang peningkatan mutu khususnya untuk ekspor impor, kebijakan non tarif telah diberlakukan dalam perdagangan dunia, yaitu *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS). Standar-standar yang terkait penetapan kebijakan TBT, seperti SNI (tingkat nasional), standar Uni Eropa yaitu UREP-GAP (*Good Agricultural Practices*), dan ISO, CAC (*Codex Alimentarius Commission*), saat ini merupakan faktor penguat daya saing suatu produk. Demikian pula dengan standar-standar yang terkait SPS, seperti standar-standar yang ditetapkan IPPC dan FAO, yaitu *International Standard for Phytosanitary Measures* (ISPM), menjadi faktor teknis lain yang memperkuat daya saing produk. Kegiatan perlindungan tanaman haruslah berperan dalam wilayah ini.

Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura diarahkan untuk upaya pengamanan produksi dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim, menjamin mutu produk hortikultura agar aman konsumsi, serta terpenuhinya beberapa

persyaratan SPS-WTO untuk akses pasar ekspor dalam rangka peningkatan daya saing produk.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan kegiatan adalah :

1. Menurunkan kerugian hasil karena gangguan OPT, dampak perubahan iklim (banjir, kekeringan, OPT baru, dan perubahan status OPT); mendukung peningkatan ekspor produksi hortikultura, meningkatnya produksi hortikultura untuk konsumsi dalam negeri, baik jumlah maupun mutu, serta mengurangi residu pestisida dalam proses produksi.
2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan OPT secara ramah lingkungan.
3. Meningkatkan koordinasi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian perlindungan hortikultura;
4. Meningkatkan kemampuan SDM dan kelembagaan perlindungan hortikultura, baik pusat maupun daerah
5. Meningkatkan kegiatan perlindungan hortikultura dalam pengembangan agribisnis hortikultura.

Sasaran kegiatan adalah :

1. Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura, maksimum 5 % terhadap luas panen

2. Jumlah peraturan, rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur perlindungan tanaman
3. Jumlah SLPHT, pelaksanaan pelatihan, penyebarluasan informasi terkait perlindungan tanaman hortikultura
4. Kasus kandungan residu pestisida melampaui BMR
5. Jumlah kelompok pengguna agens hayati
6. Jumlah *Pest List* pada komoditas potensial ekspor
7. Luas wilayah peramalan OPT/iklim di wilayah pengembangan hortikultura utama

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

a. Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPPH) dari 32 provinsi. Sedangkan 1 provinsi (Kepulauan Riau) hanya melaksanakan kegiatan pengendalian OPT karena kelembagaan dan sistem perlindungan tanaman di provinsi belum terbentuk. Kegiatan dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi yang memiliki fungsi perlindungan tanaman untuk melaksanakan pengendalian OPT dan belum memiliki UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Lokasi kegiatan ini difokuskan di sentra-sentra produksi hortikultura, di pengembangan kawasan hortikultura, didaerah daerah/ lokasi pelaksanaan program program pengembangan agribisnis hortikultura di semua propinsi.

b. Komponen kegiatan

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah kegiatan dalam rangka menunjang sistem perlindungan tanaman mencakup berbagai kegiatan utama (payung kegiatan), yaitu : (1) penyusunan program dan rencana kerja program, (2) pengamatan peramalan OPT dan fenomena iklim, (3)

sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT), (4) pengembangan kelembagaan perlindungan tanaman hortikultura, (5) pemasyarakatan perlindungan tanaman hortikultura, (6) pengendalian OPT, dan (7) sinergisme system perlindungan tanaman dalam pemenuhan persyaratan SPS-WTO. Kegiatan-kegiatan tersebut memayungi berbagai kegiatan dengan tujuan dan sasaran seperti diuraikan dalam Bab I.

c. Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman (BPTPH) di 32 provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau yang hanya mempunyai fungsi perlindungan tanaman, belum memiliki kelembagaan sistem perlindungan tanaman.

d. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh dana APBN yang dialokasikan pada Satker UPTD BPTPH dan atau Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau.

e. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan petugas/aparatur perlindungan tanaman dari UPTD BPTPH, instansi terkait, dan petani di wilayah pengembangan agribisnis hortikultura.

Metode pelaksanaan dalam bentuk pertemuan koordinasi, pembinaan/bimbingan teknis, sosialisasi/workshop,

penerapan teknologi pengendalian OPT dengan agens hayati dan biopestisida, pengendalian ramah lingkungan, pelaksanaan SLPHT, pemasyarakatan perlindungan tanaman, pemberdayaan pelaku perlindungan tanaman (petugas/petani), monitoring dan evaluasi kegiatan.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Sumberdaya manusia
2. Teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun pihak pihak lain
3. Pendanaan bersumber dari APBN

B. Keluaran (Output)

Berkembangnya sistem perlindungan tanaman dalam mendukung keberlanjutan penyediaan produk hortikultura yang cukup, bermutu dan aman konsumsi serta pemenuhan sebagai persyaratan teknis perdagangan hortikultura, dengan indikator sebagai berikut :

4. Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap luas panen, maksimum 5 %
5. Peraturan rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur perlindungan tanaman
6. Kegiatan SLPHT, penyebarluasan informasi PHT, terlaksananya pelatihan teknis untuk petugas terkait perlindungan tanaman hortikultura
7. Hasil Analisis residu pestisida pada produk hortikultura

8. Kelembagaan petani (Petani Pengguna Agens Hayati, alumni SLPHT, kelompok tani dll) dan kelembagaan perlindungan perlindungan tanaman yang kuat.
9. *Pest List* sesuai dengan standar SPS-WTO
10. Wilayah peramalan OPT dan dampak fenomena iklim (DFI) pada wilayah pengembangan hortikultura utama

Ukuran out put adalah :

Kuantitas :

1. Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen maksimum 5 %.
2. Jumlah peraturan, rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur perlindungan tanaman
3. Jumlah SLPHT, pelaksanaan pelatihan, penyebarluasan informasi
4. Kasus kandungan residu pestisida yang melampaui BMR.
5. Jumlah kelompok pengguna agens hayati
6. *Pest list* yang dibuat/dihasilkan
7. Luas wilayah peramalan OPT/iklim

Kualitas :

1. Efektifitas dan efisiensi pengendalian OPT
2. Tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip PHT
3. Kesigapan menanggapi kasus OPT/Iklim

C. Hasil (Outcome)

Kegiatan pengendalian OPT dalam mendukung peningkatan produksi, keamanan pangan, mutu dan terpenuhi sistem perlindungan tanaman dalam memenuhi persyaratan SPS-WTO.

D. Manfaat (Benefit)

Pengendalian OPT dilaksanakan secara efektif, efisien dan aman lingkungan dalam mendukung peningkatan produksi, keamanan pangan, mutu dan terpenuhi sistem perlindungan tanaman dalam memenuhi persyaratan SPS-WTTO.

E. Dampak (Impact)

Meningkatnya dukungan sistem perlindungan tanaman dalam peningkatan produksi, keamanan pangan, mutu dan terpenuhinya sistem perlindungan tanaman dalam pemenuhan persyaratan SPS-WTO.

1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mencapai tujuan di sub-sektor tanaman hortikultura tidak terlepas dari berbagai gangguan. Salah satu gangguan yang dihadapi adalah timbulnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan tersebut perlu dilakukan kegiatan perlindungan tanaman. Kegiatan perlindungan tanaman merupakan suatu sistem yang ditunjang oleh berbagai subsistem antara lain tersedianya informasi mengenai OPT, bencana alam melalui petugas PHP, efektivitas petugas di lapangan, keadaan kelompok tani, efektifitas pengaturan serta tersedianya sarana pengendalian OPT.

Untuk mengantisipasi serangan OPT hortikultura, diperlukan adanya perencanaan program perlindungan tanaman hortikultura yang mantap.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan kegiatan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan tanaman hortikultura, baik tingkat pusat maupun di daerah.

2. Mensinergikan kegiatan perlindungan tanaman hortikultura dan kegiatan lain dalam program pengembangan agribisnis hortikultura.
3. Memberi dasar pijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan teknis perlindungan tanaman hortikultura.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan perlindungan tanaman hortikultura antara Pemerintah, petani, pengusaha dan masyarakat lainnya, di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten.
2. Terbangunnya sinergi kegiatan perlindungan tanaman hortikultura yang merupakan bagian dari sistem dan usaha agribisnis hortikultura.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi :

Kegiatan dilaksanakan pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dari 32 provinsi dan Dinas Pertanian, Provinsi Kepulauan Riau.

2. Komponen kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan program dan rencana kerja teknis program meliputi :

- a. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis)
- b. Monitoring
- c. Evaluasi
- d. Pelaporan

3. Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman (BPTPH) di 32 provinsi dan Dinas Pertanian, Provinsi Kepulauan Riau.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh dana APBN yang dialokasikan pada Satker UPTD BTPH dan Dinas Pertanian, Provinsi Kepulauan Riau.

5. Metode

Metode kegiatan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan perlindungan tanaman hortikultura tahun 2010, diantaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan, menghadiri pertemuan dari Pusat serta koordinasi dan konsultasi ke Pusat.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Sumberdaya manusia
2. Pendanaan bersumber dari APBN

Komponen-komponen yang diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan meliputi SDM yang tersedia, dana kegiatan dan sarana serta prasarana yang diperlukan.

B. Keluaran (Output)

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan program Pemerintah dengan menghasilkan program kegiatan antara lain perencanaan ditingkat daerah (kabupaten, kota dan provinsi) dengan indikator :

1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan tanaman Hortikultura baik di pusat maupun di daerah.
2. Terlaksananya koordinasi kegiatan perlindungan tanaman hortikultura dan kegiatan lain dalam program pengembangan agribisnis hortikultura.

C. Hasil (Outcome)

DIPA dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dalam wadah Satker di tingkat Provinsi yaitu Satuan Kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau.

D. Manfaat (Benefit)

Kegiatan pengendalian OPT hortikultura dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan program dan rencana kerja teknis program yang disusun.

E. Dampak (Impact)

Meningkatnya efisiensi, efektivitas serta sinergi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman hortikultura dalam mendukung peningkatan produksi, keamanan pangan, mutu dan pemenuhan persyaratan perdagangan hortikultura.

2. PENGAMATAN DAN PERAMALAN OPT DAN FENOMENA IKLIM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam program pembangunan pertanian, tanaman hortikultura yang meliputi tanaman sayur, buah, hias, dan biofarmaka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan petani. Akan tetapi dalam budidaya tanaman hortikultura terdapat beberapa kendala, antara lain Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), sehingga pengendaliannya perlu mendapat perhatian.

Pengembangan budidaya tanaman hortikultura memerlukan sarana informasi yang baik dan lengkap agar para petani dapat mengembangkannya dengan baik. Salah satu informasi yang diperlukan adalah informasi mengenai OPT, dan faktor-faktor penyebab timbulnya serangan OPT yang dapat mengakibatkan penurunan produksi, baik kuantitas maupun kualitas, yaitu adanya perubahan faktor iklim. Perubahan faktor iklim sebagai akibat pemanasan global, akan berdampak kepada perubahan status OPT, timbulnya OPT baru dan bencana alam berupa kekeringan dan banjir. Perubahan faktor tersebut perluantisipasi dan mitigasi, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan, melalui upaya pengamatan/peramalan serangan OPT dan faktor iklim, analisis serangan OPT/faktor iklim serta

pelaporan yang ditujukan untuk budidaya tanaman yang lebih sesuai.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan kegiatan adalah :

1. Mengetahui spesies/jenis dan morfologi OPT, gejala serangan OPT, dan kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh serangan OPT.
2. Mengetahui perkembangan serangan OPT, populasi OPT, identifikasi tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan dampak perubahan faktor iklim terhadap budidaya hortikultura.
3. Mendapatkan informasi tentang spesies/jenis OPT dan faktor iklim dan melaporkannya sesuai dengan standar pengamatan OPT untukantisipasi langkah budidaya hortikultura yang lebih sesuai.

Sasaran kegiatan adalah :

1. Tersedianya informasi teknologi/metode pengamatan spesifik lokasi sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang serangan OPT dan faktor iklim, dampaknya terhadap tanaman serta rekomendasi yang dihasilkan untuk budidaya tanaman hortikultura yang sesuai.
2. Tertanggulangnya serangan OPT, baik yang bersifat endemik, eksplosif maupun OPT baru, dengan proporsi serangan OPT maksimum 5 % dari luas panennya.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH) dari 32 provinsi dan Dinas Pertanian, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi kegiatan ini difokuskan di sentra-sentra produksi hortikultura, di lokasi pengembangan kawasan hortikultura, didaerah daerah/ lokasi pelaksanaan program program pengembangan agribisnis hortikultura di semua propinsi.

2. Komponen kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan pemantuan/ peramalan OPT dan faktor iklim, analisis data, pemberian rekomendasi penanggulangan OPT, dan penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) pelaporan OPT dan faktor iklim, serta pembekalan teknis kepada petugas dalam rangka pengamatan/peramalan OPT dan faktor iklim.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan pengamatan OPT, bencana alam dan perubahan iklim
- b. Deteksi dini dan mitigasi dampak fenomena iklim (DFI)
- c. Antisipasi dini dampak fenomena iklim (DFI)

- d. Analisis dampak fenomena iklim (DFI)
- e. Pengelolaan dan pelaporan data OPT hortikultura
- f. Pembekalan teknis

3. Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman (BPTPH) di 32 provinsi dan Dinas Pertanian, Provinsi Kepulauan Riau.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh dana APBN yang dialokasikan pada Satker UPTD BPTPH dan Dinas Pertanian, provinsi Kepulauan Riau.

5. Metode

Metode pelaksanaan dalam bentuk pertemuan koordinasi, pembinaan/bimbingan pengamatan/peramalan OPT dan faktor iklim, penyampaian antisipasi dan kewaspadaan timbulnya serangan OPT endemis/eksplosif dan OPT baru serta upaya antisipasinya. Dengan metode tersebut, tujuan dan sasaran program dapat dicapai, yaitu proporsi luas serangan OPT maksimum 5 % dari luas panen.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. SDM pelaku perlindungan tanaman yang berkemampuan
2. Teknologi dan metode pengamatan yang ada dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, serta lembaga penelitian
3. Anggaran (APBNP).

B. Keluaran (Output)

Berkembangnya subsistem pengamatan/ peramalan OPT dan faktor iklim untuk peningkatan kewaspadaan dan antisipasi budidaya tanaman yang baik, terutama dalam :

1. Menekan luas serangan OPT, dengan proporsi maksimal 5 % terhadap luas panennya.
2. Berkembangnya SIM pelaporan OPT serta peringatan dini dan kewaspadaan terhadap serangan OPT dan faktor spesifik

C. Hasil/Outcome :

Kegiatan pengamatan/peramalan OPT dan faktor iklim dalam mendukung peningkatan system peringatan dini (*early warning system*) dan antisipasinya untuk budidaya tanaman yang baik.

D. Manfaat

Pengamatan/peramalan OPT dan faktor iklim dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai pedoman standar yang ada dan pengembangannya yang spesifik lokasi

E. Dampak

Menurunnya proporsi serangan OPT maksimal 5% dari luas panen.

3. SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SL-PHT)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) berupaya mewujudkan petani sebagai ahli PHT, yaitu sebagai manajer yang mampu mengatasi segala permasalahan di lahan usahatannya secara mandiri. Usaha menciptakan dan memperkuat petani sebagai manajer usahatani tersebut tidak terlepas dari peran fasilitator (pemandu lapang) yang mampu memfasilitasi mereka dalam kegiatan SLPHT.

SLPHT merupakan metode penyuluhan yang digunakan dalam mengimplementasikan PHT. Persyaratan SLPHT yaitu : (1) mempunyai peserta dan pemandu lapangan; (2) peserta mempraktekkan/menerapkan secara langsung apa yang dipelajari di lapangan; (3) mempunyai kurikulum, evaluasi dan sertifikat tanda lulus; dan (4) melaksanakan tahapan pembukaan, pelaksanaan, kunjungan lapangan dan diakhiri dengan temu lapangan.

Pemandu Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (PL-PHT), haruslah petugas yang memiliki keterampilan dalam hal kepemanduan, kepemimpinan dan seluk beluk pelatihan partisipatoris yang berazaskan pada proses belajar dari pengalaman dan pendidikan orang dewasa (*Adult Education* /

Andragogi). Pemandu lapangan PHT bisa berasal dari petugas (POPT/PHP, PPL) ataupun Petani Alumni SLPHT.

Lahan/lapangan dan ekologi pertanian setempat yang hidup dan dinamis merupakan sarana belajar utama, jika diperlukan sarana belajar lain, maka hanya berupa "Petunjuk Teknis", yaitu petunjuk/pedoman langkah-langkah proses belajar.

Peserta SLPHT adalah petani pemilik dan penggarap lahan usahatani yang responsif terhadap teknologi baru, produktif, baik pria maupun wanita. Sebagai petani mereka bukan milik dan bawahan siapapun.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Melalui kegiatan SLPHT petani dan pemandu lapangan diharapkan mampu memasyarakatkan PHT, sehingga SLPHT yang semula bersifat lokal akan terus hidup dan berkembang melalui POPT/PHP, PPL, dan aparat pemerintah lainnya.

Sasaran

1. Berkembangnya dan memasyarakatnya penerapan PHT.
2. Berkurangnya dampak negatif penggunaan pestisida.
3. Meningkatnya kinerja petugas POPT.

BAB II PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DI PROVINSI

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPPH) dari 32 provinsi dan Dinas Pertanian, Propinsi Kepulauan Riau. Sedangkan lokasi SLPHT terletak di sentra-sentra produksi hortikultura, di lokasi pengembangan kawasan hortikultura, didaerah daerah/lokasi pelaksanaan program program pengembangan agribisnis hortikultura di semua propinsi, dengan rincian pada Lampiran 1.

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan berupa pelaksanaan SL-PHT untuk komoditas hortikultura antara lain pertemuan koordinasi, pertemuan kelompok tani, pengadaan sarana SL, dll.

3. Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini adalah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPPH) di 32 provinsi dan Dinas Pertanian provinsi Kepulauan Riau, dengan melibatkan petugas dan petani peserta SLPHT.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Satker BTPPH Propinsi dan Dinas Pertanian, Provinsi Kepulauan Riau.

5. Metode

Kegiatan SL PHT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah peserta SLPHT 25 orang petani (kecuali SLPHT tanaman hias dapat diikuti oleh 15 – 20 orang peserta); maksimal adalah 30 orang per kelompok tani. Lebih dari jumlah itu, pelaksanaan SLPHT tidak efektif. Kelompok tani peserta diketuai oleh seorang ketua kelompok. Setiap kelompok tani peserta dibagi menjadi 5 sub kelompok dan setiap sub kelompok dikoordinasikan oleh ketua sub kelompok.
- b. Kegiatan hanya dilakukan mulai pagi hari sampai siang hari, kondisi ekosistem yang paling baik.
- c. Materi/kurikulum yang dibahas selama kegiatan berlangsung terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi baku/wajib (nasional) dan materi muatan lokal.
- d. Pelaksanaan kegiatan SLPHT merupakan proses belajar peserta yang berlangsung secara periodik (dua mingguan, mingguan ataupun periode tertentu/sesuai fenologi tanaman) selama satu musim tanam penuh/ periode waktu/sesuai fenologi tanaman (sebanyak 12 – 16 kali pertemuan). Materi/ kurikulum yang dibahas selama kegiatan berlangsung terdiri dari materi baku/wajib yaitu : Lahan PHT dan pembandingnya, Test Ballot Box (tes awal dan tes akhir); Topik khusus : Penerapan Prinsip-Prinsip PHT, Analisis Agroekosistem, Teknik Budidaya, Pelestarian Musuh Alami dan Agens

Hayati, Pengendalian OPT dan Gulma, Panen/Pasca Panen), Penggunaan Pesticida dengan Baik dan Benar, Dinamika kelompok; Materi muatan lokal yaitu : Studi petani, dan materi lain yang ditetapkan berdasarkan permasalahan yang dihasilkan dari pertemuan perencanaan. Pedoman pelaksanaan SLPHT secara rinci tersedia dalam buku tersendiri.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan

1. Dana
2. Sumberdaya Manusia (petugas, petani/kelompok tani dan gapoktan.)
3. Pedoman SLPHT.

B. Keluaran (Output)

Terlaksananya penyelenggaraan SLPHT bagi kelompok tani/Gapoktan yang terseleksi.

C. Hasil (Out come)

261 unit SLPHT hortikultura di di sentra-sentra produksi hortikultura, di lokasi pengembangan kawasan hortikultura, didaerah daerah/lokasi pelaksanaan program program pengembangan agribisnis hortikultura di seluruh propinsi.

D. Manfaat (Benefit)

Pengelolaan budidaya hortikultura lebih efektif, efisien dan mengurangi ketergantungan pada pestisida dalam pelaksanaan PHT.

E. Dampak (impact)

Meningkatnya pengetahuan petani dalam penerapan budidaya hortikultura dengan menekan penggunaan pestisida.

Lampiran 1.**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (1564)**

No.	PROPINSI	Jumlah (unit)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	7
2	Sumatera Utara	6
3	Sumatera Barat	20
4	Kepulauan Riau	3
5	Riau	6
6	Jambi	8
7	Sumatera Selatan	9
8	Bengkulu	6
9	Lampung	10
10	Bangka Belitung	2
11	Jawa Barat	25
12	Banten	7
13	Jawa Tengah	24
14	DKI Jakarta	2
15	D.I Yogyakarta	10
16	Jawa Timur	31

No.	PROPINSI	Jumlah (unit)
17	Kalimantan Barat	7
18	Kalimantan Timur	4
19	Kalimantan Selatan	3
20	Kalimantan Tengah	4
21	Sulawesi Utara	7
22	Sulawesi Selatan	9
23	Sulawesi Tengah	4
24	Sulawesi Barat	4
25	Sulawesi Tenggara	4
26	Bali	11
27	Nusa Tenggara Barat	4
28	Nusa Tenggara Timur	7
29	Gorontalo	5
30	Papua	3
31	Papua Barat	4
32	Maluku	3
33	Maluku Utara	2
Total		261

4. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perlindungan tanaman yang saat ini berjalan masih banyak tertumpu pada inisiasi pemerintah. Peran kelompok masyarakat, terutama kelompok tani alumni sekolah lapang PHT (SLPHT), termasuk ikatan petani pemandu yang melakukan pemanduan dalam SLPHT, masih belum diberdayakan secara baik. Kelompok-kelompok tani hasil pembinaan dalam SLPHT dan kelompok penerap teknologi spesifik lokasi dengan agens hayati belum diberdayakan secara optimal dalam setiap proses budidaya.

Untuk lebih mendayagunakan kelompok-kelompok tersebut, terutama dalam mengembangkan kemandirian petani dalam proses usahatani, perlu fasilitasi kegiatan untuk memperkuat kegiatan kelompok. Kelompok-kelompok tersebut didorong untuk lebih meningkatkan dinamisasi organisasi, sistem kerja, dan bidang usaha ke arah asosiasi/gabungan kelompok tani yang memiliki posisi tawar dalam melakukan pemasaran hasilnya dan memperkuat jejaring kerja dengan Laboratorium PHP dan Laboratorium Agens Hayati. Kegiatan-kegiatan bagi kelompok-kelompok tersebut berupa pemantapan kemampuan SDM petani alumni SLPHT dalam penerapan dan pengembangan teknologi PHT, pemberdayaan petani sebagai agen penyebarluasan dan pelembagaan PHT di wilayah

pengembangan hortikultura, dan mendorong tumbuhnya jejaring kerja kelompok tani yang lebih luas, termasuk dengan kelembagaan laboratorium PHP dan laboratorium agens hayati di wilayah.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan dari kegiatan adalah :

1. Pemantapan kemampuan SDM petani alumni SLPHT dalam penerapan dan pengembangan teknologi PHT.
2. Memberdayakan petani sebagai agen penyebarluasan dan pelebagaan PHT di wilayah pengembangan agribisnis hortikultura.
3. Membangun jejaring kerja kelompok tani dalam bidang yang lebih luas terutama dalam pengembangan agribisnis hortikultura.

Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah :

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Pemberdayaan petani alumni SLPHT di provinsi-provinsi basis pelaksanaan kegiatan SLPHT
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium PHP dan laboratorium penerapan agens hayati dalam pengelolaan OPT di kawasan.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Lokasi kegiatan

Kegiatan pengembangan kelembagaan perlindungan tanaman hortikultura dilaksanakan pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPPH) di 32 provinsi dan Dinas Pertanian, Propinsi Kepulauan Riau. Sedangkan lokasi kegiatannya terletak di sentra-sentra produksi hortikultura, di lokasi pengembangan kawasan hortikultura, di daerah-daerah/lokasi pelaksanaan program-program pengembangan agribisnis hortikultura di semua propinsi.

B. Komponen kegiatan

1. Penguatan kelembagaan petani alumni SLPHT berbasis kawasan hortikultura (kawasan pengembangan dan kawasan intensif) melalui gerakan pengendalian OPT dalam kawasan.
2. Pertemuan koordinasi alumni SLPHT dalam penyusunan program dan gerakan pengendalian OPT di kawasan
3. Pembinaan Pos Informasi dan Pelayanan Penerapan Agens Hayati sebagai pengendali OPT
4. Penguatan kelembagaan laboratorium PHP dan laboratorium agens hayati

C. Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah 32 UPTD BTPH provinsi dan dan Dinas Pertanian, Propinsi Kepulauan Riau serta didukung oleh petugas ditingkat lapang.

D. Pembiayaan

Dana kegiatan bersumber pada Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hortikultura pada Satker UPTD BTPH 32 provinsi dan dan Dinas Pertanian, Propinsi Kepulauan Riau.

E. Metode

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi penyusunan program penguatan alumni SLPHT dalam penerapan teknologi pengendalian ramah lingkungan dan gerakan penerapan pengendalian OPT spesifik lokasi.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

Sumberdaya manusia pelaku perlindungan tanaman yang berkemampuan, teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi, ramah lingkungan, dan hasil studi/penelitian petani, dan dana bersumber dari APBN, APBD, maupun kelompok tani.

B. Keluaran (Output)

1. Terlaksananya inventarisasi informasi kegiatan studi-studi / kajian-kajian petani dalam penanganan OPT dan kajian laboratorium PHP serta laboratorium agens hayati.
2. Tersebarinya informasi teknologi pengelolaan OPT antara petani.

C. Hasil (Outcome)

Fasilitasi pertemuan koordinasi petani alumni SLPHT dan PPAH di sentra-sentra produksi hortikultura, di lokasi pengembangan kawasan hortikultura, didaerah daerah/lokasi pelaksanaan program program pengembangan agribisnis hortikultura di semua propinsi

D. Manfaat (Benefit)

1. Berkembangnya gerakan pengendalian OPT oleh kelompok tani secara swadaya dengan teknologi yang efektif, efisien, mudah dan murah.

2. Meningkatnya kemampuan laboratorium PHP dan laboratorium agens hayati dalam memfasilitasi kelompok tani menerapkan teknologi pengendalian OPT yang efektif, efisien, mudah, dan murah.

E. Dampak (Impact)

Menurunnya serangan OPT dan terwujudnya produk hortikultura yang aman konsumsi.

5. PEMASYARAKATAN PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi pengendalian OPT hortikultura telah banyak dihasilkan melalui beberapa kegiatan teknis yang dilakukan oleh Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura (LPHPTPH), Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian. Hasil-hasil dari kegiatan dan penelitian tersebut perlu disosialisasikan dan dipublikasikan kepada pelaku perlindungan maupun masyarakat, khususnya bagi inovasi baru dibidang perlindungan tanaman.

Pemasayarakatan, sosialisasi dan publikasi dibidang perlindungan hortikultura tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pameran, publikasi dan promosi. Even nasional yang secara rutin diadakan dan dimanfaatkan untuk tujuan pemasayarakatn, sosialisasi dan promosi tersebut adalah Pekan Flora dan Fauna Nasional (PF2N) dan Pertemuan Masyarakat Perlindungan Tanaman dan Hewan Indonesia (MPTHI).

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan adalah :

Menyebarluaskan informasi hasil-hasil kegiatan, penelitian dan pengembangan teknologi pengendalian OPT hortikultura.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

Dipahaminya teknologi pengendalian OPT hortikultura oleh pelaku perlindungan tanaman hortikultura dan masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus dalam penerapan PHT.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPPH) dari 32 provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan lokasi dari pelaksanaan PF2N adalah Batam, Kepulauan Riau, sedangkan Temu MPTHI lokasinya akan ditentukan kemudian, berdasarkan hasil koordinasi 3 unit Eselon I lingkup Departmen Pertanian.

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan adalah menghadiri, mempersiapkan stan pameran kegiatan perlindungan hortikultura dan partisipasai dalam pameran.

3. Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini adalah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPPH) dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau, dengan melibatkan petugas, petani, dan pelaku usaha agribisnis hortikultura yang menerapkan prinsip-prinsip PHT di wilayah propinsi dan kabupaten/kota.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Satker BTPH Provinsi di 32 provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau.

5. Metode

Kegiatan Pemasyarakatan Perlindungan Hortikultura dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengadaan bahan publikasi perlindungan hortikultura berupa foto-foto, specimen OPT, buku pedoman, leaflet OPT hortikultura, sarana pengendalian OPT hortikultura, umbul-umbul, sarana display.
- c. Pelaksanaan pameran perlindungan hortikultura

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana
2. Sumberdaya Manusia (petugas, pelaku usaha, petani, kelompok tani dan gapoktan.)
3. Informasi hasil-hasil kegiatan, penelitian, pengembangan teknologi PHT pada komoditi hortikultura.

B. Keluaran (Output)

Terlaksananya penataan display pameran tentang hasil-hasil kegiatan, penelitian dan pengembangan teknologi PHT pada komoditi hortikultura, pada even PF2N dan Temu MPTHI.

C. Hasil (Outcome)

Informasi/pengetahuan pelaku perlindungan dan masyarakat di bidang PHT pada komoditi hortikultura.

D. Manfaat (Benefit)

Penerapan teknologi terbaru untuk PHT pada komoditi hortikultura.

E. Dampak (impact)

Meningkatnya penerapan PHT pada komoditi hortikultura.

6. PENGENDALIAN OPT HORTIKULTURA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan tanaman oleh OPT sangat berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan, bahkan dapat merugikan petani. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menekan serangan OPT. Upaya-upaya tersebut berupa koordinasi pengendalian OPT, penerapan teknologi pengendalian melalui pemanfaatan agens hayati dan biopestisida serta pengendalian ramah lingkungan lainnya, pemberdayaan petani dalam pengendalian OPT dan gerakan pengendalian OPT yang didukung oleh petugas perlindungan tanaman di lapangan.

Pengendalian OPT dilakukan berdasarkan hasil pengamatan OPT, analisis agroekosistem, dan ketersediaan sumberdaya manusia pelaku perlindungan terutama petani, ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian. Pengendalian OPT dilakukan sesuai UU No 12 tahun 1992 dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab petani. Peran pemerintah dalam pengendalian OPT, terutama dalam penanganan OPT yang timbul secara eksplosif atau timbulnya OPT baru sebagai akibat perubahan iklim, adalah fasilitator.

Untuk mempersiapkan kemampuan petani dalam pengendalian OPT, berbagai upaya dilakukan baik melalui sosialisasi

pengendalian OPT, kajian penerapan pengendalian, maupun gerakan pengendalian sendiri. Sarana pengendalian OPT yang digunakan adalah teknologi pengendalian yang efektif, efisien, aman dan diterima oleh petani, antara lain dengan agens hayati dan biopestisida, penggunaan musuh alami, serta teknologi ramah lingkungan lainnya. Di samping itu, untuk efisiensi pengendalian OPT, petani perlu pengetahuan dalam menggunakan pestisida yang baik dan benar agar aman terhadap petani sendiri, konsumen, dan lingkungan serta sumber daya hayati lainnya. Ditinjau dari aspek kelembagaan, fungsi pengendalian OPT dilakukan melalui pembinaan secara teknis, penyiapan/fasilitasi standar operasional dan mekanisme operasionalnya dilakukan instansi Pusat, yaitu Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura dan UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman di 32 provinsi serta Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan kegiatan adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanggulangan OPT hortikultura dengan menggunakan agen hayati, aman konsumsi dan ramah lingkungan
2. Menurunnya serangan OPT hortikultura
3. Terkendalinya infeksi dan eksplosi serangan OPT

Sasaran kegiatan adalah :

1. Tersedianya teknologi pengendalian OPT dan sarana pengendalian lainnya, seperti agen hayati, biopestisida untuk penanggulangan OPT hortikultura
2. Tertanggulangnya OPT baik yang bersifat endemik, eksplosif maupun OPT baru dengan proporsi serangan maksimum 5 % dari luas panen.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di provinsi

a. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD Balai Proteknsi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dari 32 provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi kegiatan ini difokuskan di sentra-sentra produksi hortikultura, di pengembangan kawasan hortikultura, di daerah daerah/ lokasi pelaksanaan program program pengembangan agribisnis hortikultura di semua propinsi.

b. Komponen kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan/bimbingan teknis pengendalian OPT, fasilitasi biaya operasional petugas POPT (BOP POPT) di 3 provinsi yang terdiri dari Jawa Barat (100 orang), Jawa Tengah (100 orang) dan Jawa Timur (107 orang), penerapan teknologi pengendalian menggunakan agens hayati dan biopestisida, sosialisasi penggunaan pestisida yang baik dan benar dengan residu minimum, gerakan pengendalian OPT endemis, pembekalan teknis untuk petugas POPT dalam rangka bimbingan teknis kepada petani, dan pengendalian OPT pasca panen.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Operasional pembinaan pengendalian OPT
- b. Penerapan penggunaan agens hayati dan biopestisida

- c. Penerapan penggunaan pestisida secara baik dan benar
 - d. Penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan
 - e. *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dalam pengendalian OPT pada beberapa komoditas hortikultura
 - f. Gerakan pengendalian OPT endemis pada tanaman hortikultura
 - g. Bimbingan pengendalian OPT hortikultura
 - h. Penyusunan dan identifikasi OPT pasca panen, hanya di 3 provinsi (di Pulau Jawa)
- c. Pelaksana
- Pelaksana kegiatan adalah UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman (BTPPH) di 32 provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Pembiayaan
- Kegiatan ini dibiayai oleh dana APBN yang dialokasikan pada Satker UPTD BTPPH dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau.
- e. Metode
- Metode pelaksanaan dalam bentuk pertemuan koordinasi, pembinaan/bimbingan teknis, sosialisasi/workshop penerapan teknologi pengendalian OPT dengan agens hayati dan biopestisida, pengendalian ramah lingkungan, sosialisasi pengendalian pestisida secara baik dan benar, gerakan pengendalian OPT, dan pembekalan teknis terhadap pelaku perlindungan tanaman (petugas/petani).

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. SDM, pelaku perlindungan tanaman yang berkemampuan,
2. Teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian,
3. Anggaran/dana (sumber pendanaan APBN).

B. Keluaran (Output)

Berkembangnya subsistem pengendalian OPT yang efektif dan efisien terutama dalam :

1. Terlaksananya pengendalian OPT Hortikultura di 33 Provinsi.
2. Berkembangnya teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi (agens hayati, biopestisida, dan ramah lingkungan), yang aman bagi petani, konsumen, dan lingkungan .
3. Tersosialisasikannya cara-cara penggunaan pestisida yang aman dengan residu minimum.
4. Terbayarnya BOP POPT untuk 307 orang (di Provinsi Jawa Barat 100 orang, Jawa Tengah 100 orang dan Jawa Timur 107 orang).

C. Hasil (Outcome)

Proporsi serangan OPT hortikultura maksimal 5% terhadap luas panen.

D. Manfaat (Benefit)

Petani mampu melaksanakan prinsip-prinsip PHT dalam budidaya hortikultura

E. (Impact)

Meningkatnya kegiatan PHT yang ramah lingkungan dengan produk hortikultura yang aman konsumsi.

7. SINERGISME SISTEM PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN SPS-WTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah disadari bersama, bahwa serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), merupakan salah satu faktor pembatas dalam upaya peningkatan produksi pertanian, termasuk hortikultura. Untuk itu perlindungan tanaman memegang peranan penting dalam pengamanan produksi, khususnya dalam menekan kehilangan hasil/kerugian ekonomi petani akibat serangan OPT.

Dengan kelembagaan perlindungan tanaman yang ada saat ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terutama meliputi pengamatan/peramalan OPT, surveilans, diagnosis OPT dan serangannya, koleksi OPT dan bagian tanaman yang bergejala, pelaporan, dan penyediaan sarana/prasarana pengendalian OPT.

Dengan keberlakuan ketentuan SPS-WTO yang mengikat dalam perdagangan global produk pertanian, maka setiap negara anggota diminta untuk memenuhi tuntutan yang dipersyaratkan oleh pasar internasional. Perdagangan internasional akan menuntut tersedianya produk-produk hortikultura bermutu yang diyakini bebas dari kandungan OPT. Hal ini mengandung makna, bahwa peran perlindungan tanaman akan semakin penting, tidak semata-mata dalam pengamanan produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan upaya yang bertujuan untuk mensinergikan sistem perlindungan tanaman hortikultura dengan pemenuhan persyaratan standar SPS-WTO. Tanpa mengubah struktur organisasi perlindungan tanaman yang ada, kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung perlu disesuaikan untuk tujuan pemenuhan persyaratan dimaksud, sekaligus sebagai upaya untuk mendukung akselerasi ekspor produk hortikultura Indonesia.

Kegiatan-kegiatan saat ini oleh jajaran perlindungan tanaman, khususnya oleh instansi perlindungan tanaman daerah (Laboratorium Hama dan Penyakit/LPHPT) seyogyanya diarahkan pada upaya pemenuhan persyaratan SPS, meliputi surveilans, koleksi, identifikasi dan pelaporan OPT, yang kesemuanya harus disesuaikan dengan standar ISPM (*International Standards for Phytosanitary Measures*), serta dengan dukungan fasilitas sarana-prasarana untuk koleksi dan identifikasi OPT sesuai standar ISPM.

Pada tahun 2009, kegiatan ini telah mulai dirintis di 12 propinsi, tepatnya di 18 Laboratorium PHP yang berada diwilayah 12 UPTD BTPH tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan tersebut, belum seluruhnya tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sehubungan dengan itu pada tahun 2010 telah dialokasikan kegiatan yang sama, namun pelaksanaannya ditekankan lebih kepada pemantapan pelaksanaan kegiatan.

Tujuan dan sasaran

Tujuan

1. Memantapkan pelaksanaan kegiatan sinergisme sistem perlindungan tanaman hortikultura dalam pemenuhan persyaratan SPS-WTO
2. Mendukung penyediaan produk hortikultura bermutu yang bebas cemaran OPT
3. Mendukung akselerasi ekspor produk hortikultura

Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah 12 propinsi potensi ekspor komoditi hortikultura, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, dan Riau.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan 12 di UPTD Balai Proteknsi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH), yaitu : Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Lampung. Sedangkan lokasinya difokuskan di 18 Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) yang berada diwilayah 12 BTPH tersebut. 18 llaboratorium PHP tersebut : Indramayu, Tasikmalaya dan Bandung (Jawa Barat), Petarukan dan Semarang (Jawa Tengah), Bantul (DI Yogyakarta), Surabaya, Pandaan dan Tanggul (Jawa Timur), Cibubur (DKI Jakarta), Deli Serdang (Sumatera Utara), Bukittinggi (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Lampung Selatan (Lampung), Tangguwisia (Bali), Narmada (NTB), Pontianak (Kalimantan Barat).

2. Komponen kegiatan

- a. Sosialisasi kegiatan sinergisme sistem perlindungan tanaman dalam pemenuhan persyaratan SPS-WTO
- b. Workshop kegiatan sinergisme sistem perlindungan tanaman dalam pemenuhan persyaratan SPS-WTO
- c. Surveilans OPT hortikultura (Pemantapan)

- d. Identifikasi OPT hortikultura Sesuai Standar ISPM (Pemantapan)
- e. Koleksi specimen OPT hortikultura (Pemantapan)
- f. Rintisan Area Prevalensi OPT Rendah (Area Low of Pest Prevalence / ALPP) di 3 (tiga) provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) untuk komoditas tertentu yang telah diidentifikasi (pemantapan).

3. Pelaksana

Pelaksana utama kegiatan adalah 18 LPHP di daerah/sentra produksi, meliputi : Indramayu, Tasikmalaya dan Bandung (Jawa Barat), Petarukan dan Semarang (Jawa Tengah), Bantul (DI Yogyakarta), Surabaya, Pandaan dan Tanggul (Jawa Timur), Cibubur (DKI Jakarta), Deli Serdang (Sumatera Utara), Bukittinggi (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Lampung Selatan (Lampung), Tanguwisia (Bali), Narmada (NTB), Pontianak (Kalimantan Barat).

Sedangkan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman (UPTD BTPPH) dari 12 provinsi, yaitu : Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Lampung.

4. Pembiayaan

Dana kegiatan bersumber APBN 2010, pada 12 Satker UPTD BTPPH.

5. Metode

Metode pelaksanaan dalam dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pertemuan koordinasi, workshop TOT (ditingkat Pusat), workshop untuk petugas, perjalanan pembinaan/ bimbingan teknis,.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. SDM perlindungan tanaman yang berkemampuan,
2. Teknologi dan informasi tentang standar persyaratan perdagangan global yang ditetapkan WTO
3. Dana

B. Keluaran (Output)

1. Terlaksananya kegiatan sinergisme dalam pemenuhan persyaratan SPS-WTO
2. Terlaksananya kegiatan identifikasi dan surveilans OPT Hortikultura
3. Tersedianya koleksi spesimen OPT Hortikultura
4. Terlaksananya perintisan area prevalensi OPT rendah.

C. Hasil (Outcome)

Paket hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan SPS-WTO, antara lain berupa koleksi OPT dan identifikasi OPT untuk menyusun *Pest List* yang diperlukan untuk penguatan daya saing produk ekspor, dan upaya-upaya pengembangan lainnya.

D. Manfaat (Benefit)

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan stakeholder perlindungan tanaman termasuk petugas dan petani dalam menginisiasi sinergi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman hortikultura yang memenuhi persyaratan SPS-WTO dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan LPHP.

E. Dampak (Impact)

Meningkatnya daya saing 14 jenis produk hortikultura untuk ekspor.

**8. KEGIATAN PEDAMPINGAN
PENGENDALIAN OPT, KARANTINA,
PENYAKIT HEWAN DAN PENINGKATAN
KEAMANAN PANGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan risiko yang harus dihadapi dan diperhitungkan dalam setiap usaha budidaya tanaman untuk mempertahankan produk pada tarif tinggi sesuai dengan harapan. Risiko ini merupakan konsekuensi dari setiap perubahan ekosistem sebagai akibat perkembangan teknologi budidaya tanaman hortikultura. Oleh karena itu dalam penanggulangan di daerah sentra produksi dan juga merupakan endemis OPT perlu penerapan prinsip PHT tanaman hortikultura skala luas dan diharapkan dapat memperkecil risiko kehilangan hasil. Dengan demikian diharapkan produktivitas mantap, kesejahteraan petani meningkat, populasi OPT dan kerusakan tanaman hortikultura tetap berada pada aras yang secara ekonomis tidak merugikan, serta mengurangi risiko pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida. Kegiatan ini secara komprehensif telah dialokasikan pada Satker Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH) pada masing-masing propinsi. Namun demikian sebagai unit kerja yang masih memiliki fungsi perlindungan tanaman, khususnya komoditi hortikultura, yang secara organisasi menjadi tanggungjawab struktural Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka pola penganggarannya merupakan

kegiatan pendampingan dan tata cara pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik lokasi maupun sasarannya

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan dari kegiatan adalah :

Melaksanakan gerakan pengendalian serangan OPT secara terpadu (berkoordinasi dengan Balai Proteksi Tanaman Pangan/UPTD).

Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya serangan OPT pada tanaman hortikultura.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan BTPH pada sentra produksi hortikultura yang terserang OPT

2. Komponen Kegiatan

- a. Pengamatan, Peramalan OPT dan Fenomena Iklim
- b. Pembinaan Pelaksanaan SLPHT dan pengelolaan OPT

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Petugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi, petugas teknis BTPH, PHP/POPT, PPL dan Laboratorium PHPT. Pelaksana utama kegiatan adalah 18 LPHP di daerah/sentra produksi, meliputi : Indramayu, Tasikmalaya dan Bandung (Jawa Barat), Petarukan dan Semarang (Jawa Tengah), Bantul (DI Yogyakarta), Surabaya, Pandaan dan Tanggul (Jawa Timur), Cibubur (DKI Jakarta), Deli Serdang (Sumatera Utara), Bukittinggi (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Lampung Selatan (Lampung), Tanguwisia (Bali), Narmada (NTB), Pontianak (Kalimantan Barat).

Sedangkan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman (UPTD BTPH) dari 12 provinsi, yaitu : Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Lampung.

Penerima manfaat adalah : Kelompok tani

4. Pembiayaan

Dana kegiatan bersumber pada Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hortikultura pada Satker UPTD BTPH 12 provinsi. Dana kegiatan bersumber pada kegiatan Pengendalian OPT, Penyakit Hewan, Karantina, dan Peningkatan Keamanan Pangan 1564 – TP) dalam mendukung pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura dalam Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hortikultura, TA 2010.

Pelaksanaan kegiatan ini dituangkan dalam bentuk barang (honor terkait dengan output kegiatan, belanja bahan, belanja jasa profesi, belanja jasa lainnya dan belanja perjalanan lainnya (DN)), berupa Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura.

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi :

- 1) Pertemuan koordinasi antar petugas lapangan

Dilaksanakan dalam persiapan tindakan korektif pengendalian OPT (petugas teknis dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi, petugas teknis BPTP, PHP/POPT, PPL dan Laboratorium PHPT)

2) Diskusi petani

Dilaksanakan di lapangan dengan beberapa kelompok kecil petani dalam satu hamparan, membicarakan langkah-langkah pengendalian yang telah dikuasai, dan telah disiapkan dalam lembaran teknologi.

3) Tindakan korektif/pengendalian

Berdasarkan hasil kesepakatan diskusi, apabila perlu dilakukan pengendalian, maka perlu difasilitasi sarana pengendalian sesuai dengan rekomendasi dalam lembaran teknologi baik jenis maupun jumlah yang diperlukan (disesuaikan dengan dana yang tersedia). Beberapa sarana pengendalian yang disediakan, antara lain benih bermutu bersertifikat, likat kuning siap pakai, agens hayati, kerodong, bahan pengendalian dari tumbuhan hasil inovasi para petani yang telah dibuktikan dilapangan serta pestisida sebagai alternatif terakhir.

4) Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut

Evaluasi dilaksanakan bersama antara seluruh petugas yang terkait dengan petani yang terlibat langsung dalam kegiatan ini

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Sarana pengendalian (benih, likat kuning, agens hayati, pestisida, dll)
2. Lembar teknologi pengendalian

B. Keluaran (Output)

1. Terlaksananya kegiatan Pengamatan, Peramalan OPT dan Fenomena Iklim
2. Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pelaksanaan SLPHT dan pengelolaan OPT

C. Hasil (Outcome)

Serangan OPT dapat ditekan penyebarannya.

D. Manfaat (Benefit)

Petani mampu memproduksi hortikultura yang aman konsumsi dan berkualitas

E. Dampak (Impact)

Produk hortikultura dapat bersaing di pasar internasional.

**PEDOMAN TEKNIS
BANTUAN BENIH/BIBIT, SARANA
PRODUKSI PERTANIAN, DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN PERBENIHAN
(KODE 1520)**

1. REVITALISASI PERBENIHAN HORTIKULTURA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran benih sebagai sarana utama agribisnis tidak dapat digantikan oleh sarana yang lain. Berkembang atau tidaknya usaha agribisnis sangat ditentukan oleh perkembangan perbenihannya, oleh karena itu agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka sistem dan usaha perbenihan harus tangguh.

Ketersediaan benih bermutu sangat strategis karena merupakan tumpuan utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya hortikultura. Potensi hasil suatu varietas unggul ditentukan oleh kualitas benih yang digunakan. Untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu prima dibutuhkan benih bermutu tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul dari varietas yang diwakilinya. Mengingat pentingnya arti benih maka diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu, memperbaiki distribusi, meningkatkan pengawasan peredaran dan meningkatkan penggunaan benih bermutu dalam kegiatan agribisnis hortikultura.

Peranan institusi pemerintah dalam era desentralisasi adalah sebagai fasilitator, dinamisator dan katalisator. Upaya yang diperlukan adalah menggerakkan pelaku usaha dan

sumberdaya agar lebih terfokus dalam pembangunan perbenihan hortikultura guna mencukupi kebutuhan untuk budidaya hortikultura.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu varietas unggul secara memadai dan berkesinambungan.

Sasaran kegiatan adalah terfasilitasnya Balai Benih Hortikultura di 9 Provinsi dalam rangka Akselerasi Penyediaan Benih Unggul Hortikultura.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Propinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Benih Induk Hortikultura di 9 propinsi (Lampiran 2).

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan terdiri dari :

- a. Pengadaan pohon induk/benih sumber (buah, sayur, hias dan biofarmaka).
- b. Perbanyak benih durian, jeruk, anggrek, wortel, bawang merah, bawang putih, kentang dan krisan
- c. Forum Perbenihan Hortikultura,
- d. Pelatihan Penangkar dan Petugas Perbenihan Hortikultura, Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura,
- e. Penyediaan Sarana Screen House/Net House,
- f. Perbanyak dan Pemurnian Benih,
- g. Penataan Rantai Pasokan Perbenihan Krisan.
- h. Temu koordinasi untuk menyusun perencanaan produksi dan kebutuhan benih.
- i. Indeksing Blok Fondasi Jeruk

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Balai Benih Induk dengan Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian

Propinsi. Penerima manfaat adalah Balai Benih Induk Hortikultura dan Kebun Benih Hortikultura

4. Spesifikasi Benih Sumber

a. Spesifikasi benih sumber (buah):

- berlabel putih untuk benih sumber BF dan berlabel ungu untuk benih sumber BOMT yang dikeluarkan oleh BPSB
- Benih sumber memenuhi syarat (layak, vigor tinggi dan sehat)
- Ketinggian untuk sambung/okulasi minimal 40 cm dari awal/titik sambung okulasi sampai pucuk daun.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada Dinas Pertanian Propinsi melalui Dana Dekonsentrasi.

5. Metode

Kegiatan revitalisasi perbenihan dilaksanakan sesuai komponen kegiatan melalui koordinasi dengan Balai Benih Induk Hortikultura di wilayah masing-masing dan penangkar benih sebagai berikut :

- a. Pengadaan benih sumber BF dan BPMT bekerjasama dengan pemilik varietas tersebut dengan berkoordinasi dengan petugas BPSB setempat.
- b. Perbanyak benih durian, jeruk, anggrek, wortel, bawang merah, bawang putih, kentang dan krisan dilaksanakan melalui pengadaan benih hortikultura dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan

- berkoordinasi dengan instansi terkait (BPSBTPH dan Badan Litbang Pertanian). Khusus untuk anggrek dan krisan ketentuan sertifikasi disubsitisi dengan keterangan mutu.
- c. Forum Perbenihan Hortikultura dilaksanakan dengan mengundang pihak terkait dibidang industri benih hortikultura.
 - d. Pelatihan Penangkar dan Petugas Perbenihan Hortikultura dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan praktek langsung dilapangan dengan teknologi maju.
 - e. Penyediaan Sarana Screen House/Net House untuk fasilitasi perbaikan dan pemeliharaan screen house/ net house pada BBI Hortikultura.
 - f. Pemurnian Benih dilaksanakan melalui kerjasama dengan BPSB dan atau Badan Litbang Pertanian untuk menghasilkan varietas unggul bermutu.
 - g. Penataan Rantai Pasokan Perbenihan dilaksanakan untuk memperbaiki rantai pemasaran benih dengan melibatkan penangkar benih.
 - h. Temu koordinasi untuk menyusun perencanaan produksi dan kebutuhan benih.
 - i. Indekding dapat dilaksanakan oleh instansi berwenang (Balitjestro dan BPSB yang kompetensi).

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan/Input

1. Dana APBN
2. Sumberdaya Manusia (Petugas, Penangkar Benih dan Petani)
3. Teknologi Perbenihan
4. Informasi supply demand benih

B. Keluaran/Output

1. Tersedianya benih (benih sumber dan benih sebar) hortikultura bermutu untuk mendukung revitalisasi perbenihan.
2. Terlaksananya forum perbenihan hortikultura.
3. Tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dan terlaksananya indeksing untuk benih sumber di Blok Fondasi (BF)
4. Terlaksananya kegiatan perbanyak benih durian, jeruk, anggrek, wortel, bawang merah, dan krisan
5. Terselenggaranya Forum Perbenihan dan Temu koordinasi untuk menyusun perencanaan produksi dan kebutuhan benih,

6. Terselenggaranya pelatihan Penangkar dan Petugas Perbenihan Hortikultura, Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Hortikultura,
7. Tersedianya Sarana Screen House/Net House,
8. Tersedianya Perbanyakan dan Pemurnian Benih,
9. Terlaksananya Penataan Rantai Pasokan Perbenihan Krisan.

C. Hasil/Outcome

Berkembangnya sistem perbenihan hortikultura

D. Manfaat/Benefit

Meningkatnya ketersediaan benih bermutu hortikultura

E. Dampak/Impact

Meningkatnya penggunaan benih bermutu hortikultura dan petani hortikultura

Lampiran 2.

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
REVITALISASI PERBENIHAN HORTIKULTURA**

No.	Dinas Pertanian Provinsi	Komoditas
1	Jambi	Durian
2	Jawa Barat	Wortel dan Krisan
3	Jawa Tengah	Bawang Merah
4	D.I. Yogyakarta	Krisan
5	Jawa Timur	Jeruk Keprok dan Anggrek
6	Kalimantan Barat	Jeruk Keprok
7	Sulawesi Utara	Krisan dan Wortel
8	Bali	Jeruk Keprok
9	Nusa Tenggara Barat	Bawang Putih dan Kentang

2. BANTUAN BENIH MENDUKUNG GERBANG EKSPOR TANAMAN HIAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan tanaman hias di dunia semakin meningkat, sehingga peluang pasarnya cukup besar, khususnya tanaman hias tropis yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Indonesia yang kaya akan plasma nutfah dan sumberdaya genetik belum memanfaatkan peluang ini secara optimal. Untuk memenuhi permintaan tanaman hias tropis di pasar luar negeri, para eksportir pada umumnya masih mengandalkan eksploitasi tanaman dari hutan maupun dari pekarangan sekitar rumah penduduk. Sangat sedikit tanaman yang diekspor dilakukan melalui budidaya yang intensif dalam skala yang lebih luas. Kondisi seperti ini mengakibatkan kualitas tanaman yang diekspor kurang baik, tidak seragam, pasokan sangat terbatas yang mengakibatkan kontinuitas ekspor tidak terjamin.

Di sisi lain, eksportir tanaman hias sering dihadapkan pada kekurangan pasokan untuk memenuhi quota ekspor. Eksportir, selama ini berusaha memenuhi quota ekspornya melalui pengumpulan tanaman hias dari para pengumpul yang menghimpun dari tanaman yang tumbuh di berbagai pekarangan, kebun atau hutan. Kualitas kurang maksimal dan jumlah yang dikumpulkan juga tidak banyak dan sering

mengalami kekurangan pasokan. Tanaman yang tumbuh di sekitar pekarangan tidak dipelihara secara intensif, disamping itu semakin lama stock tanaman juga akan habis karena tidak ada upaya peremajaan atau penanaman kembali.

Potensi pengembangan tanaman hias dan peluang ekspor tanaman hias yang cukup besar perlu dimanfaatkan seluas-luasnya, disamping potensi pasar tanaman hias domestik yang belum tergarap secara optimal. Salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah pengembangan sentra produksi di gerbang ekspor, yaitu pengembangan sentra produksi tanaman hias di daerah yang mempunyai kesesuaian tumbuh terutama daerah yang dekat dengan fasilitas pelabuhan ekspor atau gerbang ekspor yaitu di propinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Pada TA. 2010 pengembangan tanaman hias orientasi ekspor ini diperluas pengembangannya di 3 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Kota Payakumbuh dan Kab.Agam) dan di Riau (Kab. Kampar).

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menyediakan benih tanaman hias bermutu untuk pengembangan kawasan/daerah sentra tanaman hias tropis.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kebun produksi tanaman hias orientasi ekspor, sehingga dapat menghasilkan

produk yang seragam, kualitas yang baik dan kuantitas terjamin.

Sasaran kegiatan adalah :

1. Meningkatnya luasan pertanaman tanaman hias tropis orientasi ekspor;
2. Tersedianya produk tanaman hias tropis orientasi ekspor yang seragam, kualitas yang baik dan jumlah yang memadai.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota sebagai lokasi Pengembangan Gerbang Ekspor Tanaman Hias (Lampiran 3).

2. Komponen Kegiatan

Komponen Kegiatan berupa penyaluran bantuan benih tanaman hias ekspor kepada Kelompok Tani/Gapoktan di wilayah gerbang ekspor tanaman hias

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menangani pembinaan hortikultura dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Penerima manfaat adalah petani hortikultura anggota Gapoktan atau Kelompok Tani Tanaman Hias jika Gapoktan belum terbentuk pada daerah gerbang ekspor tanaman hias di 6 kabupaten/kota pada 3 provinsi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh Dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai dana

Tugas Pembantuan dalam bentuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya

5. Metode

Kegiatan diawali dengan identifikasi dan penetapan calon petani / calon lokasi (CP/CL), yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota atau Dinas Pertanian.

Kegiatan bantuan benih mendukung gerbang ekspor tanaman hias dilaksanakan setelah Rencana Usaha Kelompok (RUK) disepakati dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan dana akan ditransfer ke rekening Gapoktan atau Kelompok Tani jika Gapoktan belum terbentuk di wilayah tersebut sesuai SK yang telah ditetapkan. Proses pengadaan benih tanaman hias supaya didampingi oleh BPSBTPH setempat.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan/Input

1. Dana
2. Sumberdaya Manusia (Petani, Petugas dan Penangkar)
3. Teknologi Perbenihan Tanaman Hias

B. Keluaran/Output

Terlaksananya penyediaan benih bermutu tanaman hias orientasi ekspor untuk mendukung pengembangan kawasan tanaman hias orientasi ekspor di propinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

C. Hasil/Outcome

Meningkatnya volume produksi tanaman hias orientasi ekspor di provinsi Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

D. Manfaat/Benefit

Meningkatnya pengembangan usaha tanaman hias tropis orientasi ekspor.

E. Dampak/Impact

Meningkatnya ekspor tanaman hias tropis.

Lampiran 3.

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
BANTUAN BENIH Mendukung GERBANG EKSPOR
TANAMAN HIAS**

No	Propinsi	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota	Komoditas
1	Riau	1. Kab. Kampar	Raphis
		2. Kota Pekanbaru	Raphis
2	Sumatera Barat	3. Kota. Payakumbuh	Raphis
		4. Kota Bukit Tinggi	Raphis
		5. Kab. Agam	Raphis
3	Kepulauan Riau	6. Kab. Bintan	Raphis

3. BANTUAN BENIH DI KAWASAN HORTIKULTURA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memasuki era globalisasi dewasa ini, peranan benih bermutu dari varietas unggul akan menjadi semakin penting karena untuk mampu bersaing dipasaran internasional produk pertanian yang dihasilkan haruslah mempunyai kualitas yang baik disamping produksi yang juga harus tinggi.

Pembangunan di bidang perbenihan hortikultura bertujuan untuk mempersiapkan tersedianya benih bermutu dari varietas unggul secara lestari dan berkesinambungan sehingga usaha-usaha peningkatan produksi dan kualitas produksi tanaman hortikultura melalui penyediaan benih bermutu dari varietas unggul bagi petani dapat dilakukan dengan lancar.

Untuk menjamin penyediaan benih bermutu dari varietas unggul yang dibutuhkan petani sesuai dengan 7 (tujuh) kriteria tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga). diperlukan kesamaan persepsi tentang perbenihan hortikultura dalam memfasilitasi terbentuknya kerjasama antara balai benih hortikultura dengan para penangkar benih, peningkatan penangkar informal menjadi penangkar formal, membentuk wadah/kelompok/ forum penangkar benih dalam meningkatkan posisi tawar perbenihan hortikultura dan lain-lain.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyediakan benih hortikultura untuk mendukung pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi
2. Meningkatkan mutu dan produksi hortikultura

Sasaran kegiatan adalah:

1. Tersedianya benih hortikultura bermutu di kawasan hortikultura terintegrasi
2. Meningkatnya mutu dan produksi hortikultura

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Propinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada kawasan hortikultura oleh Dinas Pertanian Provinsi (Lampiran 4).

2. Komponen Kegiatan

Komponen Kegiatan berupa pengadaan benih hortikultura sebagai bantuan untuk pengembangan usaha agribisnis hortikultura di Kawasan Hortikultura Terintegrasi.

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian Propinsi yang menangani pembinaan perbenihan hortikultura dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

Penerima Manfaat adalah petani anggota Gapoktan/ kelompok Tani hortikultura pada kawasan hortikultura terintegrasi di 12 propinsi.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada Dinas Pertanian Propinsi melalui Dana Dekonsentrasi.

5. Metode

Pelaksanaan kegiatan bantuan benih di kawasan terintegrasi hortikultura berupa pengadaan benih hortikultura sesuai kebutuhan di kawasan terintegrasi hortikultura dengan pendampingan oleh BPSBTPH.

Benih hortikultura akan disalurkan kepada petani untuk mendukung pengembangan kawasan hortikultura melalui Kelompok Tani/Gapoktan yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan/Input

1. Dana APBN
2. Benih hortikultura bermutu

B. Keluaran/Output

Terlaksananya penyediaan bantuan benih hortikultura bermutu di propinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

C. Hasil/Outcome

Meningkatnya pengembangan usaha agribisnis hortikultura

D. Manfaat/Benefit

Meningkatnya mutu dan produksi hortikultura pada wilayah kawasan hortikultura.

E. Dampak/Impact

Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura.

Lampiran 4.

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
BANTUAN BENIH DI KAWASAN TERINTEGRASI
HORTIKULTURA**

No.	Dinas Pertanian Provinsi
1	Sumatera Barat
2	Jawa Barat
3	Jawa Tengah
4	D.I Yogyakarta
5	Jawa Timur
6	Kalimantan Barat
7	Kalimantan Timur
8	Sulawesi Utara
9	Sulawesi Selatan
10	Sulawesi Tengah
11	Nusa Tenggara Barat
12	Nusa Tenggara Timur

4. Penguatan Kelembagaan Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perbenihan merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan pertanian, khususnya pada subsektor tanaman hortikultura. Hal ini karena faktor benih memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan produksi dan produktivitas tanaman. Semakin tinggi mutu benih yang digunakan, akan semakin besar produksi yang dihasilkan. Disamping itu, penggunaan benih bermutu ternyata juga dapat meningkatkan intensitas pertanaman, mutu hasil dan sebagai sarana pengendali hama dan penyakit tanaman.

Mengingat pentingnya arti benih dalam kegiatan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan, maka perlu diciptakan suatu kondisi perbenihan yang dapat mendukung ketersediaan benih yang mampu memenuhi kebutuhan petani secara 7 (tujuh) tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan tepat harga).

Salah satu upaya yang harus dilakukan agar ketersediaan benih dapat terpenuhi sesuai prinsip 7 tepat dan berkelanjutan adalah optimalisasi Sistem Perbenihan yang telah dibangun, yang meliputi Subsistem Penelitian, Pemuliaan dan Pelepasan Varietas; Subsistem Produksi dan Distribusi Benih; Subsistem Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih; serta Subsistem Penunjang (Kelembagaan, SDM dan Sarana Prasarana).

Dalam pelaksanaan pembangunan perbenihan, pada setiap subsistem tersebut melibatkan banyak institusi yang terkait yaitu pemerintah (Puslitbangtan, BATAN, Perguruan Tinggi, Direktorat Perbenihan, Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota, Balai Benih, Institusi/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih), dan *stakeholders* perbenihan lainnya (produsen/penangkar/pedagang benih). Peranan dari masing-masing kelembagaan perbenihan tersebut pada setiap subsistem perbenihan sangat menentukan keberhasilan pembangunan perbenihan, khususnya pada subsektor tanaman hortikultura.

Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) berperan dalam mengawas penerapan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan mutu, peredaran dan sertifikasi benih. Sebagai institusi pengawas seyogyanya BPSB mempunyai tenaga profesional dan terampil yang dapat mengikuti perkembangan industri perbenihan. Namun sampai saat ini keadaan SDM lingkup BPSB baik di tingkat propinsi maupun pengawas benih di tingkat kabupaten jumlah dan tingkat keterampilan masih terbatas untuk menjangkau wilayah peredaran benih yang sangat luas. Keterbatasan sarana kerja dan keterbatasan tingkat pendidikan dan pelatihan merupakan kendala yang sangat krusial dalam pengembangan operasional tugas BPSB.

Agar BPSB dapat berperan secara optimal dalam memberikan pelayanan dan kepastian jaminan mutu benih kepada produsen dan konsumen benih serta dalam melakukan pengawasan dan

sertifikasi benih, maka perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain: 1) Pimpinan dan staf harus memahami teknologi perbenihan secara luas dan proaktif mencari inovasi teknologi; 2) mengoptimalkan pemanfaatan dan pengaturan kerja SDM yang terbatas secara efisien; 3) memperbaiki kondisi sarana kerja yang ada; 4) melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam melakukan observasi varietas (untuk diusulkan sebagai calon varietas unggul baru) dan peredaran benih, baik produksi dalam negeri maupun benih impor.

Pengawas Benih Tanaman (PBT) pada BPSB merupakan tenaga fungsional yang bertugas sebagai ujung tombak dalam mengawasi mutu benih tanaman sejak dari proses produksi hingga benih siap diedarkan, sehingga benih-benih yang diproduksi dan diedarkan tersebut senantiasa memenuhi standar dan terjamin mutunya sampai ke konsumen benih.

Mengingat kondisi yang ada diatas, maka perlu dipertimbangkan stimulasi yang dapat meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan seperti peningkatan besaran tunjangan fungsional, sehingga diharapkan pengawasan mutu benih termasuk hortikultura dapat dilaksanakan secara optimal. Dampak lebih lanjut peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, khususnya hortikultura dapat dicapai.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengoptimalkan dukungan untuk menghasilkan varietas unggul;

2. Mengembangkan dan menyebarkan varietas unggul;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan unit usaha benih untuk menghasilkan benih unggul bermutu;
4. Meningkatkan pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan mutu benih;
5. Meningkatkan produksi dan distribusi benih;
6. Meningkatkan penyediaan benih unggul dan bermutu sesuai kawasan pengembangan;
7. Mendorong peningkatan dan pengembangan penerapan teknologi perbenihan dan SDM.
8. Mendorong pengembangan jejaring dan ketepaduan dalam industri/ system perbenihan.
9. Memantapkan kelembagaan perbenihan.

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Tersedianya benih hortikultura bermutu di dalam negeri secara cukup dan berkesinambungan serta memenuhi 7 (tujuh) tepat (jenis, varietas, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu) sehingga produksi dan produktivitasnya meningkat yang pada akhirnya pendapatan petani meningkat.
2. Stakeholder perbenihan hortikultura memahami peraturan perbenihan.

3. Produsen benih hortikultura dalam negeri menerapkan sertifikasi benih
4. Benih-benih hortikultura yang beredar di pasaran terjamin mutunya.
5. Benih-benih impor, khususnya benih sayuran dan buah semusim yang beredar di pasaran memenuhi ketentuan yang berlaku (berlabel, keterangan sudah berbahasa Indonesia dan memenuhi standar mutu).
6. Timbulnya kesadaran masyarakat dan pihak yang terkait dalam menggunakan benih bermutu.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPSBTPH di 33 Provinsi dan BBPPMBTPH.

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan adalah :

- a. Uji Adaptasi / Observasi Varietas Hortikultura
- b. Determinasi dan duplikasi pohon induk
- c. Pembinaan dan operasional sertifikasi benih
- d. Analisa mutu benih
- e. Pengawasan peredaran benih
- f. Pelatihan petugas pengawas dan analisis benih
- g. Operasional Balai Pengawasan dan sertifikasi benih
- h. Operasional laboratorium benih hortikultura
- i. Sosialisasi peraturan perbenihan
- j. Insentif Pengawas Benih Tanaman (PBT) berupa Biaya Operasional Pengawas (BOP).

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

- 1) Pelaksana kegiatan adalah petugas Pengawas Benih Tanaman pada BPSBTPH dan BBPPMBTH dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Balai.

2) BOP diberikan kepada Pengawas Benih Tanaman dan Calon Pengawas Benih Tanaman yang telah melaksanakan tugas pengawasan benih tanaman dan telah terdaftar di BPSBTPH provinsi yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi di wilayah tersebut.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada BPSBTPH dan BBPPMBTH melalui Dana Dekonsentrasi.

5. Metode

Secara umum kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan uji adaptasi dan observasi dalam rangka pelepasan varietas komersial hortikultura, pembinaan sertifikasi benih hortikultura, pembinaan pengujian mutu benih hortikultura, dan pembinaan pengawasan peredaran benih dalam bentuk pertemuan koordinasi, sosialisasi, pendampingan dan pembinaan pengembangan monitoring dan pelaporan.

BAB III
INDIKATOR KINERJA

A. Masukan/input

1. Dana APBN
2. Sumberdaya manusia (PBT, penangkar benih)
3. Peraturan-peraturan perbenihan hortikultura

B. Keluaran/Output

1. Tersedianya laporan hasil uji observasi dan observasi
2. Tersedianya proposal usulan pelepasan varietas
3. Tersedianya pohon induk yang layak untuk benih sumber
4. Meningkatnya pelayanan sertifikasi benih
5. Tersedianya laporan hasil uji laboratorium
6. Terlaksananya pembinaan pengawasan peredaran benih
7. Meningkatnya kompetensi PBT
8. Terlaksananya pemeriksaan pendahuluan, lapangan gudang dan pengambilan contoh di lapang
9. Tersedianya gambaran penerapan peraturan perbenihan oleh produsen dan penyalur benih
10. Terlaksananya sosialisasi kegiatan Sertifikasi dan pengawasan mutu benih
11. Terbayarkannya insentif PBT untuk waktu 1 tahun

C. Hasil/Outcome

Tersedianya benih hortikultura bermutu di dalam negeri secara cukup dan berkesinambungan

D. Manfaat/Benefit

Meningkatnya mutu dan produksi benih hortikultura

E. Dampak/Impact

Meningkatnya kesejahteraan penangkar benih dan petani hortikultura

PEDOMAN TEKNIS
MEKANISASI PERTANIAN PRA DAN PASCA
PANEN (KODE 1569)

KEGIATAN PENGEMBANGAN ALSINTAN HORTIKULTURA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat dan atau mesin pertanian (alsintan) merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian khususnya produk hortikultura. Peran alat dan mesin pertanian dalam sistem budidaya tanaman sangat penting dalam pengembangan usaha pertanian yang berorientasi agribisnis/agroindustri yang dituntut peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam upaya peningkatan mutu daya saing produk, termasuk produk pada kawasan hortikultura.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil di kawasan hortikultura melalui penggunaan alat dan mesin pertanian.
2. Mengoptimalkan potensi komoditas dan wilayah sebagai sentra produksi hortikultura dalam menghasilkan produk hortikultura yang berdaya saing.
3. Menyediakan Alsintan di kawasan hortikultura terintegrasi dengan pendampingan intensif.

Sasaran kegiatan adalah :

1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil di kawasan hortikultura melalui penggunaan alat dan mesin pertanian.
2. Tersedianya alsintan bagi pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi dengan pendampingan intensif.
3. Tersedianya alat pertanian bagi kelembagaan on farm dan pasca panen pada kawasan hortikultura.
4. Tersosialisasinya penggunaan Alsintan hortikultura.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Propinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian (yang membidangi hortikultura) di 12 Provinsi pada 14 Kabupaten/Kota di Indonesia (Lampiran 5).

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan adalah :

- a. Pengembangan alsintan hortikultura
- b. Pendampingan pemanfaatan alsin hortikultura
- c. Sosialisasi alsin hortikultura.

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan ini adalah Subdin Produksi atau Subdin yang menangani hortikultura dengan melibatkan petugas/petani/pelaku usaha/pemangku kepentingan di wilayah provinsi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh Dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Satker Dinas Pertanian (yang membidangi

pengembangan hortikultura) Provinsi dengan MAK Belanja Barang Operasional dan Belanja Modal Peralatan Mesin.

5. Metode

Secara umum kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan dan pemberdayaan alsintan pada kegiatan mekanisasi pertanian dalam bentuk pertemuan koordinasi, sosialisasi, pendampingan, penumbuhan dan pengembangan UPJA, monitoring dan pelaporan. Disamping itu tersedia pengadaan alsintan dalam bentuk belanja modal dan peralatan mesin untuk Balai Benih Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten.

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian (yang membidangi hortikultura) yang tersebar di 14 Kabupaten di Indonesia.

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan adalah pengadaan alsintan budidaya hortikultura..

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan ini adalah Subdin Produksi atau Subdin yang menangani hortikultura dengan melibatkan petugas/ petani/pelaku usaha/pemangku kepentingan di wilayah

kabupaten/kota. Sebagai penanggung jawab adalah Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota.

Penerima manfaat adalah petani hortikultura anggota Gapoktan atau kelompok Tani (UPJA) yang berada pada kawasan hortikultura di 14 kabupaten/kota pada 12 provinsi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh dana APBN yang dialokasikan pada dana Tugas Pembantuan pada DIPA Satker pada Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) kab/kota dengan MAK Belanja lembaga sosial lainnya.

5. Metode

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan identifikasi dan penetapan calon petani / calon lokasi (CP/CL) oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota atau Dinas Pertanian yang ditunjuk.

Dana untuk pengadaan alsintan akan ditransfer ke rekening Gapoktan/Kelompok Tani yang telah terseleksi setelah Rencana Usaha Kelompok (RUK) disepakati dan disetujui oleh tim Teknis Kabupaten/kota. Alokasi dana diatur dengan komposisi **20-25%** digunakan untuk penguatan kelembagaan Usaha Penumbuhan dan Usaha Pengembangan Jasa Alsintan (UPJA) pada kelompok tani/gapoktan pada kawasan hortikultura, sedangkan **75-80 %** digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berupa pengadaan alsintan

untuk pengembangan hortikultura. Jumlah, jenis dan spesifikasi alsintan yang diadakan merupakan hasil kesepakatan anggota kelompok tani/gapoktan/UPJA penerima bantuan. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertugas mengarahkan agar pengadaan alsintan sesuai dengan kebutuhan gapoktan/kelompok tani/UPJA dalam pengembangan agribisnis hortikultura dengan ketentuan alsin yang diadakan mempunyai SNI atau Surat Keterangan Kesesuaian (SKK) atau minimal mempunyai test yang berwenang. Pengelolaan alsin pada gapoktan/kelompok tani mengaju pada Permentan No. 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat atau Mesin Pertanian hortikultura seseuai dengan kebutuhan riil Gapoktan/ kelompok tani dalam mendukung pengembangan usaha agribisnis hortikultura.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan/input

1. Dana APBN
2. Sumberdaya manusia (petugas, dan petani)

B. Keluaran/Output

1. Terlaksananya kegiatan pendampingan pemanfaatan Alsintan Hortikultura
2. Terlaksananya pengadaan alsintan untuk pengembangan hortikultura bagi gapoktan yang terseleksi.

C. Hasil/ Outcome

Tersedianya alsintan untuk mendukung pengembangan hortikultura

D. Manfaat/ Benefit

Pengelolaan usaha budidaya lebih efektif, efisien dan optimal.

E. Dampak/Impact

Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura melalui dukungan pemanfaatan alsintan hortikultura

Lampiran 5.

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
HORTIKULTURA**

No.	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	SUMATERA BARAT	1 Kota Bukit Tinggi
		2 Kota Padang Panjang
2.	KEPULAUAN RIAU	3 Kota Batam
3.	JAMBI	4 Kab. Batanghari
4.	SUMATERA SELATAN	5 Kab. Ogan Komering Ulu
5.	JAWA BARAT	6 Kab. Bandung
6.	BANTEN	7 Kota Tangerang
7.	JAWA TENGAH	8 Kab. Banjarnegara
		9 Kab. Tegal
8.	D.I. YOGYAKARTA	10 Kab. Kulon Progo
9.	JAWA TIMUR	11 Kab. Pasuruan
10.	KALIMANTAN BARAT	12 Kab. Kubu Raya
11.	SULAWESI UTARA	13 Kab. Minahasa selatan
12.	SULAWESI SELATAN	14 Kab. Gowa
	12 Propinsi	14 Kabupaten/ Kota

PEDOMAN TEKNIS
PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN
MUTU PRODUK PERTANIAN SERTA
PENGEMBANGAN KAWASAN (TP)
(KODE 1589)

1. PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA DENGAN PENDAMPINGAN INTENSIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan hortikultura difokuskan pada peningkatan produksi dan mutu untuk memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri. Bila mutu produk hortikultura Indonesia tidak dapat memenuhi standar sesuai kebutuhan konsumen, maka dikawatirkan Indonesia akan dibanjiri oleh produk hortikultura impor.

Upaya peningkatan produksi dan mutu tersebut dilakukan melalui cara budidaya yang baik dan benar dengan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) pada sentra-sentra produksi hortikultura yang akan dikembangkan menjadi kawasan hortikultura.

Pengembangan kawasan hortikultura harus diikuti juga dengan perbaikan sarana dan prasarana usaha, pemberdayaan rantai pasokan, penguatan kelembagaan di berbagai segmen usaha, peningkatan jaminan keamanan konsumsi bagi konsumen untuk mendukung upaya perbaikan mutu, sehingga akses pasar produk hortikultura Indonesia menjadi semakin meluas.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan hortikultura dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis GAP pada daerah-daerah yang potensial serta pada beberapa kabupaten sentra hortikultura.

Kawasan hortikultura dengan pendampingan intensif merupakan suatu wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis pasar mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya secara intensif, penanganan dan pengolahan pasca panen, pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya. Untuk itu diperlukan dukungan sub sektor terkait secara terintegrasi pada aspek budidaya hingga pemasaran.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan adalah untuk mendorong peningkatan produksi dan mutu hortikultura pada kawasan pengembangan melalui penerapan GAP dan SOP.

Sasaran kegiatan adalah terbentuknya kawasan hortikultura terintegrasi di 91 kabupaten/kota pada 21 Provinsi yang mampu menghasilkan produk bermutu untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, bahan baku industri dan ekspor dengan menerapkannya praktek budidaya yang baik dan benar (GAP) menuju sertifikasi yang diakui secara nasional dan internasional.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura Terintegrasi Berbasis GAP yang tersebar di 32 kawasan dilaksanakan pada 21 Dinas Pertanian Provinsi (Lampiran 6).

2. Komponen Kegiatan berupa :

- a. Pengembangan kawasan hortikultura,
- b. Penerapan GAP/SOP hortikultura,
- c. Pertemuan untuk penyusunan profil/*road map* kawasan agribisnis hortikultura,
- d. Koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan program pengembangan kawasan.
- e. Perjalanan dalam rangka koordinasi, bimbingan teknis pengembangan kawasan dan konsultasi.

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Propinsi yang menangani pembinaan hortikultura. Penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi, sedangkan penerima manfaat dari kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis GAP dengan pendampingan intensif adalah kelompok tani/ GAPOKTAN di 32 kawasan, 91 kab/kota pada 21 propinsi.

4. Pembiayaan

Biaya untuk pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi berbasis GAP dengan pendampingan intensif dialokasikan melalui dana Dekonsentrasi pada Dinas Propinsi dengan jenis belanja : belanja bahan, belanja barang non operasional, belanja perjalanan, belanja modal peralatan dan mesin.

5. Metode

Metode yang dilaksanakan berupa kegiatan pendampingan dalam penerapan GAP/SOP hortikultura, pengembangan kawasan hortikultura, penyusunan profil/ *roadmap* komoditas hortikultura, sinkronisasi dan pertemuan identifikasi, pendampingan dan pembinaan pengembangan kawasan hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

1. Lokasi

Lokasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura Terintegrasi Berbasis GAP dengan pendampingan intensif tersebar pada 91 kabupaten /kota (Lampiran 6) yang merupakan daerah sentra produksi hortikultura (Lampiran 6).

2. Komponen Kegiatan:

Komponen kegiatan berupa pengembangan kawasan hortikultura sesuai dengan jenis komoditas yang telah ditentukan dalam Petunjuk Operasional kegiatan (POK).

3. Pelaksana/kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan pengembangan hortikultura dengan pendampingan intensif adalah Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota yang menangani pembinaan hortikultura dengan Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Penerima manfaat dari kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis GAP dengan pendampingan intensif adalah petani sebagai anggota Gapoktan atau kelompok tani apabila Gapoktan belum terbentuk.

4. Pembiayaan

Biaya untuk pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi berbasis GAP dengan pendampingan intensif dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pada MAK Belanja Sosial Lainnya (Bansos). Satu unit kawasan hortikultura mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan kawasan hortikultura sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan cakupan jumlah petani dan luasan areal disesuaikan dengan jenis komoditas yang dikembangkan

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi berbasis GAP dengan pendampingan intensif dilakukan dalam bentuk perluasan areal pertanaman dan atau peningkatan produktivitas mutu kebun/lahan usaha dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengembangan kawasan disusun dalam bentuk Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan komposisi 20 – 25 % dana digunakan untuk penguatan kelembagaan usaha hortikultura dan 75 – 80 % digunakan untuk

bantuan bagi petani dalam pengembangan kawasan hortikultura. Rancangan kegiatan yang dapat dibiayai melalui RUK Bansos pengembangan kawasan hortikultura berbasis GAP/SOP antara lain adalah:

1) Pengembangan Kelembagaan Usaha (20 - 25 %):

- Penyelenggaraan pertemuan gapoktan/Kelompok Tani
- Fasilitasi pelatihan manajemen bagi pengurus
- Fasilitasi pembentukan asosiasi
- Fasilitasi pendampingan oleh petugas pembina (PPL, Mantri Tani, dll)
- Penyelenggaraan temu bisnis dengan pelaku usaha
- Penyelenggaraan promosi hasil (sewa stand, transpor pameran, bahan pameran)
- Pembelian ATK dan Buku Administrasi (balpoin, spidol, *white board*, buku besar, buku kas, dll)

2) Pengembangan Kawasan (75 - 80 %) :

- Administrasi Penerapan GAP dapat berupa : perbanyak Buku Kerja/Catatan Kegiatan, penyusunan dan penggandaan Buku SOP Budidaya, dll.
- Pendukung Penerapan GAP/SOP dapat berupa : pengadaan saprodi (benih, pupuk, pestisida, dll), pengadaan sarana/peralatan budidaya, pengadaan sarana/peralatan panen dan pasca panen, sarana pendukung penerapan PHT, pembuatan denah

lokasi kebun/lahan usaha, Analisa Residu Pestisida, Kandungan Hara Tanah dan Air, dll.

Pelaksanaan kegiatan di lapang dilakukan dengan melibatkan Badan Litbang Pertanian (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi) untuk dapat melaksanakan pendampingan dan pengawalan teknologi sekaligus berperan untuk meningkatkan capaian kinerja kegiatan pengembangan kawasan hortikultura. Peran Badan Litbang Pertanian adalah untuk mengakselerasi penerapan GAP/ SOP pada kawasan yang dikembangkan melalui penerapan teknologi tepat guna, uji coba teknologi baru, penguatan kelembagaan petani, sosialisasi dan dinamika kelompok yang secara bersama-sama diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan kegiatan di tingkat petani maupun kelompok tani.

Dampak pengembangan kawasan diharapkan mampu memperbaiki mutu dan produksi buah, sayuran, biofarmaka dan tanaman hias pada wilayah kawasan dengan luasan areal sesuai jenis komoditasnya sebagaimana Tabel berikut :

Tabel : Rancangan Dampak Areal Pengembangan Kawasan Hortikultura

No	Komoditas	Luas Kawasan (Ha)
I	Tanaman Buah	
1	Buah Tahunan (manggis, mangga, jeruk, pisang, durian, dll)	25
2	Strawberi dan Buah Naga	2
3	Semangka dan Melon	2
4	Anggur	5
5	Markisa	10
II	Tanaman Sayuran	
1	Sayuran Musiman (bawang merah, cabe, kentang, tomat, dll)	25
2	Paprika	3,5
3	Jamur	1,0
III	Biofarmaka	
1	Rimpang, dan Lidah buaya	10
IV	Tanaman Hias	
1	Tanaman Hias Daun, Taman, Melati, Sedap malam, dll	3
2	Raphis, Polycias, Leather leaf, dll	3
3	Anggrek dan Krisan dan Tanaman Hias pot	1

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan / Input

1. Dana
2. Sumberdaya manusia (Petugas dan petani)
3. Teknologi maju berbasis GAP/SOP
4. Data dan informasi mengenai potensi wilayah

B. Keluaran / Output

1. Terlaksananya kegiatan pembinaan untuk Pengembangan kawasan hortikultura,
2. Terlaksananya kegiatan pendampingan penerapan GAP/SOP hortikultura,
3. Terlaksananya kegiatan Pertemuan untuk penyusunan profil/*road map* kawasan agribisnis hortikultura,
4. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan program pengembangan kawasan,
5. Terlaksananya penyaluran paket bantuan untuk pengembangan kawasan hortikultura sesuai dengan jenis komoditas yang telah ditentukan dalam Petunjuk Operasional kegiatan (POK).

C. Hasil / Outcome

Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan hortikultura berbasis penerapan GAP/SOP dengan pendampingan intensif di 32 kawasan pada 91 kab/kota, di 21 propinsi.

D. Manfaat / Benefit

Terbentuknya kawasan hortikultura yang menuju skala usaha yang ekonomis dengan penerapan rantai pasok yang baik dan menerapkan teknologi maju berbasis GAP/SOP.

E. Dampak / Impact

1. Meningkatnya produksi dan mutu produk hortikultura untuk peningkatan daya saing.
2. Terjaminnya kontinuitas penyediaan produk hortikultura

Lampiran 6.

DAFTAR LOKASI KEGIATAN

PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA DENGAN
PENDAMPINGAN INTENSIF

No.	Propinsi	No. kawasan	Kab./ Kota		Komoditas		
					Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
1.	Jabar	1	1	Kab. Tasikmalaya	Cabe	Manggis	
			2	Kab. Ciamis	Cabe	Manggis	
			3	Kab. Bandung	Strawberi	Cabe	Bunga Potong
			4	Kab. Garut	Jeruk	Paprika	Cabe
			5	Kab. Bandung Barat	Bunga Potong	Paprika	
		2	6	Kab. Karawang	Jamur Merang		
			7	Kab. Cirebon	Mangga	Bawang merah	Jamur Merang
			8	Kab. Indramayu	Mangga	Jamur Merang	
			9	Kab. Purwakarta	Manggis	Jamur Merang	Biofarmaka
		3	10	Kab. Subang	Nenas	Jamur Merang	Manggis
			11	Kab. Sumedang	Tanaman Hias	Sawo	Cabe
			12	Kab. Kuningan	Bawang Merah	Mangga	
		4	13	Kab. Majalengka	Mangga	Bawang merah	
			14	Kab. Bogor	Manggis	Pisang	Tanaman Hias
			15	Kota Bogor	Anggrek	Daun potong	Jambu Biji
			16	Kota Depok	Anggrek	Belimbing	Lidah Buaya
		6	17	Kab. Cianjur	Pisang	Bunga Potong	Daun Potong
			18	Kab. Sukabumi	Manggis	Tanaman Hias	Biofarmaka
2.	Jatim	7	19	Kab. Pasuruan	Mangga	Kentang	Tanaman Hias
			20	Kab. Probolinggo	Mangga	Bawang Merah	Kentang
			21	Kab. Blitar	Cabe	Kentang	Nenas
			22	Kab. Mojokerto	Bawang Merah	Cabe	
		8	23	Kab. Bondowoso	Mangga	Sayuran Organik	Biofarmaka

No.	Propinsi	No. kawasan	Kab./ Kota		Komoditas		
					Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
			24	Kab. Situbondo	Mangga		
			25	Kab. Jember	Jeruk	Cabe Merah	Jamur
		9	26	Kab. Malang	Tanaman Hias	Sayuran Organik	Apel
			27	Kota Batu	Jeruk	Tan. Hias	Sayuran
			28	Kab. Gresik	Tan. Hias	Mangga	Cabe
3.	Jateng	10	29	Kab. Purworejo	Manggis	Biofarmaka	
			30	Kab. Magelang	Salak	Leather leaf	Biofarmaka
			31	Kab. Banjarnegara	Salak		
			32	Kab. Wonosobo	Tanaman Hias	Jeruk Keprok	
		11	33	Kab. Boyolali	Pepaya	Leather leaf	
			34	Kab. Karanganyar	Melon	Jeruk Keprok	Tanaman Hias
			35	Kab. Sragen	Melon	Buah Naga	
		12	36	Kab. Semarang	Biofarmaka	Leather leaf	
			37	Kota Semarang	Biofarmaka	Tanaman Hias	
			38	Kab. Pekalongan	Melon		
13	39	Kab. Tegal	Bawang Merah	Melati	Bawang Putih		
	40	Kab. Brebes	Bawang Merah				
4.	DIY	14	41	Kab. Sleman	Salak	Krisan	Buah Naga
			42	Kab. Kulon Progo	Biofarmaka	Cabe	
5.	Banten	15	43	Kab. Tangerang	Anggrek		
			44	Kota Tangerang	Anggrek	Tanaman Pot	Daun Potong
			45	Kab. Pandeglang	Durian	Sayuran	
6.	Sumbar	16	46	Kota Padang Panjang	Raphis		
			47	Kota Bukittinggi	Raphis		
			48	Kota Padang	Raphis		
7.	Riau	17	49	Kota Pekanbaru	Raphis	Buah Naga	
			50	Kab. Kampar	Raphis	Durian	
8.	Kepri	18	51	Kab. Bintan	Raphis	Buah Naga	
			52	Kota Batam	Raphis	Polycias	
9.	Kalbar	19	53	Kab. Pontianak	Nenas		

No.	Propinsi	No. kawasan	Kab./ Kota		Komoditas		
					Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
			54	Kota Pontianak	Sayuran Organik	Tan. Hias	Lidah Buaya
			55	Kab. Kubu Raya	Nenas		
			56	Kab. Sambas	Jeruk		
10	Sulut	20	57	Kab. Minahasa Selatan	Kentang		
			58	Kab. Bolaang Mongondow	Kentang		
			59	Kab. Bolmong Timur	Kentang		
			60	Kab. Minahasa	Bawang Merah		
			61	Kota. Tomohon	Tanaman Hias		
11.	Sulsel	21	62	Kab. Luwu Utara	Durian		
			63	Kab. Tana Toraja	Manggis		
			64	Kota Palopo	Durian		
		22	65	Kab. Bantaeng	Kentang	Manggis	
66	Kab. Gowa	Sayuran	Markisa				
12.	Bali	23	67	Kab. Tabanan	Manggis	Tanaman Hias	
			68	Kab. Gianyar	Tan. Hias		
			69	Kab. Karang Asem	Krisan	Salak	
			70	Kota Denpasar	Anggrek		
			71	Kab. Buleleng	Say Organik	Pisang	Jeruk Keprok
13.	Kaltim	24	72	Kab. Berau	Jeruk		
			73	Kab. Bulungan	Jeruk		
			74	Kab. Kutai Timur	Pisang		
			75	Kab. Nunukan	Jeruk		
14.	Lampung	25	76	Kab. Lampung Tengah	Nenas	Cabe	
			77	Kab. Lampung Selatan	Pisang	Cabe Merah	
			78	Kab. Lampung Barat	Tan. Hias	Pisang	

No.	Propinsi	No. kawasan	Kab./ Kota		Komoditas		
					Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
			79	Kab. Tanggamus	Manggis	Durian	
15.	Jambi	26	80	Kab. Batanghari	Jeruk	Durian	
			81	Kab. Kerinci	Jeruk	Kentang	
			82	Kab. Muaro Jambi	Jeruk	Durian	
			83	Kab. Ogan Komeriing Ulu	Duku	Jeruk	
17.	Bengkulu	28	84	Kab. Rejang Lebong	Cabe	Kentang	
			85	Kab. Lebong	Manggis		
18.	Kalsel	29	86	Kab. Barito Kuala	Jeruk		
19.	Sulteng	30	87	Kab. Donggala	Bawang Merah		
			88	Kota Palu	Bawang Merah		
20.	Sulbar	31	89	Kab. Mamuju	Jeruk	Say. Dtr Rendah	
			90	Kab. Mamuju Utara	Jeruk		
21.	NTB	32	91	Kab. Lombok Timur	Kentang		
21	Propinsi	32 Kaw	91 Kab./Kota				

2. PENGEMBANGAN INISIASI KAWASAN HORTIKULTURA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan komoditas-komoditas hortikultura yang potensial di suatu wilayah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian wilayah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing wilayah tersebut. Pengembangan inisiasi kawasan hortikultura dimaksudkan untuk menyiapkan pengembangan kawasan hortikultura dengan pendampingan intensif yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Keberhasilan pengembangan kawasan inisiasi akan dilanjutkan menjadi kawasan dengan pendampingan intensif di suatu wilayah yang memiliki kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis pasar mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya secara intensif, penanganan dan pengolahan pasca panen, pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya sehingga memberikan peluang semua komoditas penting (potensial) di kawasan tersebut ditangani secara proporsional.

Untuk itu pengembangan kawasan inisiasi merupakan bagian dari tahapan persiapan kawasan sentra produksi hortikultura bermutu yang dapat memenuhi permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan adalah pengembangan inisiasi kawasan hortikultura untuk mendorong peningkatan produksi hortikultura.

Sasaran kegiatan adalah terbentuknya inisiasi pengembangan kawasan hortikultura di 77 Kabupaten/Kota pada 31 Provinsi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan bahan baku industri

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Lokasi kegiatan pengembangan inisiasi kawasan hortikultura dilaksanakan pada Dinas Pertanian yang tersebar di 31 provinsi sentra produksi hortikultura

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan berupa:

- a. Pengembangan kawasan hortikultura,
- b. Pembinaan Penerapan GAP/SOP hortikultura,
- c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan program pengembangan kawasan.
- d. Penyediaan paket bantuan (Bantuan Sosial) untuk pengembangan kawasan hortikultura sesuai dengan jenis komoditas yang telah ditentukan dalam Petunjuk Operasional kegiatan (POK).

3. Pelaksana/Kelompok sasaran

Pelaksana kegiatan pengembangan inisiasi kawasan hortikultura adalah Dinas Pertanian Provinsi dengan Penanggung Jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat dari kegiatan adalah petani

sebagai anggota Gapoktan atau kelompok tani apabila Gapoktan belum terbentuk.

4. Pembiayaan

Biaya untuk pengembangan inisiasi kawasan hortikultura dialokasikan melalui dana Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian Provinsi pada MAK Belanja Sosial Lainnya (Bansos). Satu unit kawasan hortikultura mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan kawasan sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan cakupan jumlah petani dan luasan areal disesuaikan dengan jenis komoditas yang dikembangkan

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi berbasis GAP dengan pendampingan intensif dilakukan dalam bentuk perluasan areal pertanaman dan atau peningkatan mutu kebun/lahan usaha dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengembangan kawasan disusun dalam bentuk Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan komposisi 20 – 25 % dana digunakan untuk penguatan kelembagaan usaha hortikultura dan 75 – 80 % digunakan untuk bantuan bagi petani dalam pengembangan kawasan hortikultura. Rancangan kegiatan yang dapat dibiayai melalui RUK Bansos pengembangan kawasan hortikultura berbasis GAP/SOP antara lain adalah:

1) Pengembangan Kelembagaan (20 s/d 25 %):

- Penyelenggaraan pertemuan gapoktan/Kelompok Tani
- Fasilitasi Pelatihan manajemen usaha bagi pengurus
- Fasilitasi pendampingan oleh petugas pembina (PPL, Mantri Tani, dll)
- Penyelenggaraan temu bisnis dengan pelaku usaha
- Penyelenggaraan promosi hasil (sewa stand, transpor pameran, bahan pameran)
- Pembelian ATK dan Buku Administrasi (balpoin, spidol, *white board*, buku besar, buku kas, dll)

2) Pengembangan Kawasan (75 s/d 80 %) :

- Administrasi Penerapan GAP berupa : perbanyak Buku Kerja/Catatan Kegiatan, penyusunan dan penggandaan Buku SPO Budidaya, dll
- Pendukung Penerapan GAP/SOP berupa : pengadaan saprodi (benih, pupuk, pestisida, dll), pengadaan sarana/peralatan budidaya, pengadaan sarana/peralatan panen dan pasca panen, sarana pendukung penerapan PHT, dll

b. Pelaksanaan di lapang dilakukan dengan melibatkan Badan Litbang Pertanian (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi) untuk dapat melaksanakan pendampingan dan pengawalan teknologi sekaligus

berperan untuk meningkatkan capaian kinerja kegiatan pengembangan kawasan hortikultura. Peran Badan Litbang Pertanian adalah untuk mengakselerasi penerapan GAP/ SOP pada kawasan yang dikembangkan melalui penerapan teknologi tepat guna, uji coba teknologi baru, penguatan kelembagaan petani, sosialisasi dan dinamika kelompok yang secara bersama-sama diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan kegiatan di tingkat petani maupun kelompok tani.

- c. Dampak pengembangan kawasan diharapkan mampu memperbaiki mutu dan produksi buah, sayuran, biofarmaka dan tanaman hias pada wilayah kawasan dengan luasan areal sesuai jenis komoditasnya sebagaimana Tabel berikut :

Tabel : Rancangan Dampak Areal Pengembangan Inisiasi Kawasan Hortikultura

No	Komoditas	Luas Kawasan (Ha)
I	Tanaman Buah	
1	Buah Tahunan (manggis, mangga, jeruk, pisang, durian, dll)	25
2	Strawberi dan Buah Naga	2
3	Semangka dan Melon	2
4	Anggur	5
5	Markisa	10

No	Komoditas	Luas Kawasan (Ha)
II	Tanaman Sayuran	
1	Sayuran Musiman (bawang merah, cabe, kentang, tomat, dll)	25
2	Paprika	3,5
3	Jamur	1
III	Biofarmaka	
1	Rimpang	10
IV	Tanaman Hias	
1	Tanaman Hias Daun, Taman, Melati, Sedap Malam, dll	3
2	Raphis, Polycias, Leather Lef, dll	3
3	Anggrek, Krisan dan Tanaman Hias Pot	1

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan / Input

1. Dana
2. Sumberdaya manusia (Petugas dan petani)
3. Data dan informasi mengenai potensi wilayah
4. Teknologi budidaya hortikultura

B. Keluaran/ Output

1. Terlaksananya kegiatan Pengembangan kawasan hortikultura,
2. Terlaksananya Pembinaan Penerapan GAP/SOP hortikultura,
3. Terlaksananya Koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan program pengembangan kawasan.
4. Terlaksananya penyaluran paket bantuan untuk pengembangan kawasan hortikultura sesuai dengan jenis komoditas yang telah ditentukan dalam Petunjuk Operasional kegiatan (POK)

C. Hasil / Outcome

Terlaksananya kegiatan pengembangan hortikultura pada 31 propinsi di 77 kab/kota sebagai inisiasi pengembangan kawasan hortikultura.

D. Manfaat / Benefit

Terlaksananya inisiasi pengembangan kawasan hortikultura yang memenuhi skala ekonomi dengan penerapan pedoman budidaya yang baik (GAP/SOP).

E. Dampak / Impact

Meningkatnya produksi dan mutu hortikultura untuk peningkatan daya saing.

Lampiran 7.
DAFTAR LOKASI KEGIATAN
PENGEMBANGAN INISIASI KAWASAN HORTIKULTURA
TAHUN 2010

No.	Propinsi	Kab./ Kota	Komoditas		
			Prioritas 1.	Prioritas 2	Prioritas 3
1	NAD	1 Kab. Aceh Barat	Durian		
		2 Kab. Aceh Besar	Jamur	Tanaman Hias	
		3 Kab. Bireun	Jeruk		
		4 Kab. Gayo Luwes	Cabe		
2	Sumut	5 Kab. Tana Karo	Markisa	Jeruk	
		6 Kab. Simalungun	Kubis	Kentang	
		7 Kab. Tapanuli Selatan	Salak		
		8 Kota Medan	Tanaman Hias		
3	Sumbar	9 Kab. Limapuluh Kota	Jeruk	Cabe	Sayuran Organik
		10 Kab. Solok	Sayuran	Tanaman Hias	
		11 Kab. Tanah Datar	Sayuran		
		12 Kab. Pesisir Selatan	Manggis	Pisang	
		13 Kab. Solok Selatan	Sayuran	Jeruk	
		14 Kab. Agam	Jeruk	Sayuran Organik	Raphis
		15 Kab. Payakumbuh	Raphis		
4	Riau	16 Kab. Siak	Sayuran Daun	Buah Naga	
5.	Kepri	17 Kab. Lingga	Durian		
6.	Jambi	18 Kab. Merangin	Kentang	Manggis	
7.	Sumsel	19 Kab. Lahat	Manggis		
		20 Kab. Ogan Komering Ilir	Semangka	Cabe	

No.	Propinsi	Kab./ Kota	Komoditas		
			Prioritas 1.	Prioritas 2	Prioritas 3
		21 Kota Palembang	Tanaman Hias		
		22 Kab Musi Rawas	Durian		
		23 Kab. OKU Timur	Durian		
8.	Babel	24 Kab. Bangka Tengah	Jeruk Keprok		
		25 Kab. Bangka Selatan	Jeruk Keprok		
9.	Bengkulu	26 Kab. Bengkulu Utara	Salak	Jeruk	
		27 Kab. Kepahiang	Rimpang	Tanaman Hias	
10.	Lampung	28 Kab. Lampung Timur	Durian	Semangka	
11.	Banten	29 Kab. Serang	Sedap Malam		
12.	Jateng	30 Kab. Demak	Jambu Air		
		31 Kab. Pemalang	Mangga	Melati	
		32 Kab. Kendal	Pisang		
13.	D.I Y	33 Kab. Bantul	Jamur	Pisang	
		34 Kab. Gunung Kidul	Cabe	Pisang	
14.	Jatim	35 Kab. Bangkalan	Melati	Bawang Merah	
		36 Kab. Nganjuk	Bawang Merah		
		37 Kota Surabaya	Tanaman Hias		
15.	Bali	38 Kab. Bangli	Jeruk Keprok	Bawang Merah	
		39 Kab. Klungklung	Pisang		
16.	NTB	40 Kab. Bima	Bwang merah		
		41 Kab. Lombok Barat	Manggis		
		42 Kab. Lombok Tengah	Manggis		
17.	NTT	43 Kab.Sumba Tengah	Rambutan	Anggur	
		44 Kab. Lembata	Jahe	Bawang Merah	

No.	Propinsi	Kab./ Kota	Komoditas		
			Prioritas 1.	Prioritas 2	Prioritas 3
		45 Kab. Manggarai Timur	Biofarmaka		
		46 Kab. TTU	Jeruk Keprok Soe		
18.	Kalbar	47 Kab. Sanggau	Durian		
19.	Kalteng	48 Kab. Barito Selatan	Say. dtr rendah	Durian	
		49 Kab. Kapuas	Pisang		
		50 Kab. Pulang Pisau	Say. dtr rendah		
20	Kalsel	51 Kab. Banjar	Jeruk		
		52 Kab. Hulu Sungai Selatan	Cabe		
21.	Kaltim	53 Kota Samarinda	Tan. Hias		
22.	Sulut	54 Kab. Minahasa Utara	Pisang		
		55 Kota Manado	Tanaman Hias		
23.	Sulteng	56 Kab. Sigi	Bawang Merah		
		57 Kab. Parigi Moutong	Bawang Merah		
24.	Sultra	58 Kab. Buton	Jeruk Keprok		
		59 Kab. Konawe Selatan	Jeruk Keprok		
		60 Kota Kendari	Tanaman Hias	Nenas	
25.	Sulsel	61 Kab. Enrekang	Kentang		
		62 Kota Makassar	Tanaman Hias		
26.	Gorontalo	63 Kota Gorontalo	Tanaman Hias		

No.	Propinsi	Kab./ Kota	Komoditas		
			Prioritas 1.	Prioritas 2	Prioritas 3
		64 Kab. Pohnuatu	Cabe	Jeruk	
		65 Kab. Bone Bolango	Cabe	Durian	
27.	Maluku	66 Kab. Seram Bagian Barat	Cabe Merah		
		67 Kab. Seram Bagian Timur	Cabe Merah	Durian	
		68 Kab. Maluku Barat Daya	Jeruk		
28.	Malut	69 Kota Ternate	Durian		
		70 Kota Tidore Kepulauan	Durian		
29.	Papua	71 Kab. Keerom	Biofarmaka		
		72 Kab. Yahukimo	Pisang		
		73 Kab. Pegunungan Bintang	Sayuran dtr tinggi		
30.	Papua Barat	74 Kab. Sorong	Durian	Jeruk	Rambutan
		75 Kab. Sorong Selatan	Durian		
31	Sulbar	76 Kab. Majene	Nenas	Jeruk	Say. Dat. Rendah
		77 Kab. Polewali Mandar	Pisang	Say. Dat. Tinggi	
31 Propinsi		77 Kab. Kota			